

**URGENSI JAKSA PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PERMOHONAN
PENINJAUAN KEMBALI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DINDA RAHMITHA MAULIDYA

NIM. 125010107121005



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : URGENSI JAKSA PENUNTUT UMUM
MENGAJUKAN PERMOHONAN PENINJAUAN
KEMBALI**

Identitas Peneliti :

a. Nama : DINDA RAHMITHA MAULIDYA

b. NIM : 125010107121005

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 3 bulan

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Nurini Aprilianda, SH. M.Hum.

NIP. 197604292002122001

Alfons Zakaria, SH. LLM.

NIP. 198006292005011002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, SH. LLM.

NIP. 196607101992032003

HALAMAN PENGESAHAN

**URGENSI JAKSA PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PERMOHONAN
PENINJAUAN KEMBALI**

**Oleh :
DINDA RAHMITHA MAULIDYA**

125010107121005

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing

Pendamping

Dr. Nurini Aprilianda, SH. M.Hum.
NIP. 197604292002122001

Alfons Zakaria, SH. LLM.
NIP. 198006292005011002

**Dekan Fakultas Hukum
Pidana
Universitas Brawijaya**

Ketua Bagian Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
NIP. 19620805 198802 1 001

Dr. Yuliati, SH. LLM.
NIP. 196607101992032003



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Bijak karena dengan rahmat dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang ditulis untuk tugas akhir atau skripsi dengan judul **“URGENSI JAKSA PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI”**

Ucapan terima kasih penulis dihaturkan kepada :

1. **Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;**
2. **Ibu Dr. Yuliati, SH., LLM. selaku Ketua Bagian Kosentrasi Hukum Pidana;**
3. **Dr. Nurini Aprilianda, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Utama;**
4. **Bapak Alfons Zakaria, SH., LLM. selaku Dosen Pembimbing Pendamping.**

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan Skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi penulis maupun semua pihak yang membaca.

Malang, Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Ringkasan	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Sistem Peradilan Pidana	12
B. Kajian Umum Mengenai Hukum Acara Pidana	16
C. Kajian Umum tentang Jaksa Penuntut Umum	21
D. Kajian Umum Mengenai Upaya Hukum	24
E. Kajian Umum tentang Penafsiran Hukum	40
F. Kajian Umum tentang Putusan Pengadilan	42
G. Kajian Umum tentang Prinsip Universal Hak Atas	

Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak	44
---	----

H. Tinjauan Umum Mengenai Teori Tujuan Hukum	47
--	----

BAB III METODE PENULISAN

A. Jenis Penelitian	50
---------------------------	----

B. Pendekatan Penelitian	51
--------------------------------	----

C. Jenis Bahan Hukum	51
----------------------------	----

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	53
---	----

E. Teknik Analisis Bahan Hukum	53
--------------------------------------	----

F. Definisi konseptual	55
------------------------------	----

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pihak – Pihak Yang Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali	56
--	----

B. Jaksa Memiliki Hak yang Sama Dengan Terpidana (Tersangka/ Terdakwa) Dalam Hukum Acara Pidana	
1. Posisi yang Setara Karena Adanya Kontrak Sosial	64
2. Hak yang Sama Berdasarkan Asas Dalam Hukum Acara Pidana Yakni Asas <i>Equality Before The Law</i> dan Asas <i>Equality Of Arms</i>	67

C. Memperbaiki Putusan yang Keliru Dalam Hal Mencari Kebenaran Materiil Sesuai Tujuan Hukum Acara Pidana	70
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
---------------------	----



B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN 94



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Kartu Bimbingan Skripsi
3. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi
4. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi





RINGKASAN

Dinda Rahmitha Maulidya, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2016, URGensi JAKSA PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI, Dr. Nurini Aprilianda, SH., M.H, Alfons Zakaria, S.H, LL.M.

Latar belakang pemilihan tema tersebut adalah pada pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya, akan tetapi terdapat permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tataran prakteknya. Kasus tersebut diawali dari kasus Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa Muchtar Pakpahan pada tahun 1996. Akhirnya putusan terbut dijadikan yurisprudensi terkait kasus Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan berjalannya waktu, kasus serupa juga beberapa kali terjadi dan hal tersebut makin menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak lagi berjalan karena ketidak sesuaian antara ketentuan dalam undang-undang. Hal tersebut juga mendatangkan kontroversi dalam dunia akademis maupun praktisi karena kita ketahui Jaksa Penuntut Umum selain dia berada di pihak otoritas negara mereka juga mewakili kepentingan korban serta masyarakat. Maka dari itu hal tersebut yang mendorong penulis untuk menganalisis urgensi Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali. Karena dibalik ketidak sesuaian tersebut perlu diketahui apa urgensi dibalik tindakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan Undang-undang (*statute approach*). Bahan hukum yang diinventaris oleh penulis dianalisis dengan teknik deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan bahan hukum yang sama dan kemudian diinterpretasi untuk mengkaitkan makna dari setiap bahan hukum yang telah diinventaris oleh penulis. Selanjutnya dianalisis dan kemudian dihubungkan satu sama lain untuk mencari hubungan dari tiap bahan hukum tersebut. Dengan menggunakan metode seperti yang tertera di atas, penulis menemukan atas urgensi Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, yaitu Jaksa Penuntut Umum memiliki hak yang sama dengan terpidana (tersangka/ terdakwa) dalam hukum acara pidana serta Untuk memperbaiki putusan yang keliru demi terwujudnya tujuan hukum acara pidana yakni menemukan kebenaran materiil.

SUMMARY

Dinda Rahmitha Maulidya, Criminal Laws, Faculty of Law, University of Brawijaya, in February 2016, URGENCY OF PROSECUTOR GENERAL APPLYING FOR REVIEW, Dr. Nurini Aprilianda, SH., M.H, Alfons Zakaria, S.H, LL.M.

Background The choice of theme is in Article 263 paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure stipulates that you can apply for a judicial review is convicted or their heirs, but a request for a judicial review carried out by the Public Prosecutor at the level of practice. Tersebut case begins from the case Reconsideration by the Public Prosecutor on behalf of the defendant Muchtar Pakpahan in 1996. Finally terbut decision made regarding the case of jurisprudence Review by the Public Prosecutor. With the passage of time, a similar case also happened several times and it is increasingly showing that the rule of law no longer walk because of a discrepancy between the provisions in the legislation. It also brings controversy in academia and practitioners because we know the Prosecution in addition he is on the authorities of their country also represents the interests of victims and the community. Therefore it encourages the writer to analyze the urgency of the Public Prosecutor filed a Reconsideration Request. Because behind these discrepancies need to know what is the urgency behind the action to determine the next policy.

This thesis using normative juridical research method to approach the Act (statute approach). Legal materials inventoried by the authors analyzed with descriptive technique that begins with the same law classifies material and then diintepretasi to relate the significance of any legal substance that has been inventoried by the author. Then analyzed and then connected to each other to find the relationship of each ingredient that law. By using the method as stated above, the author found on the urgency of the Public Prosecutor to apply for judicial review, the Public Prosecutor has the same rights as convicts (suspects / accused) in criminal procedural law as well as to improve decision wrong for the realization of the purpose of law the criminal procedure which finding the material truth.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung hak asasi manusia dan tentunya menjamin kesetaraan di depan hukum. Salah satu ciri dari negara hukum adalah terdapat lembaga peradilan yang sistematis. Salah satu wujud penerapan Indonesia sebagai negara hukum terdapat suatu lembaga peradilan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan peraturan yang mengatur, menyelenggarakan, dan bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran sesungguhnya.¹ Peradilan pidana pada dasarnya lebih mengutamakan perlindungan hak pembuat kejahatan (*offender centered*) karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk memeriksa serta tersangka yang mana hal tersebut juga mengambil atau membatasi hak-hak tersangka.²

Suatu lembaga peradilan dapat dikatakan baik apabila dalam proses peradilan tersebut berlangsung dengan jujur, tidak memihak dan bersih. Tidak hanya itu saja, masih terdapat kriteria yang harus dipenuhi, yaitu terbuka, korektif serta rekorektif. Dalam pasal 10 *The Universal Declaration of Human Rights* terdapat prinsip *fairness* dan *trial independency*, yang mana

¹ Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 4

² Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan**, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 176

hal tersebut patut menjadi perhatian untuk manajemen peradilan yang diakui secara universal. Prinsip universal berarti mengakui setiap orang mempunyai hak yang sama di depan hukum serta berhak atas perlindungan hukum tanpa adanya perlakuan sikap diskriminasi apapun. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas peradilan yang efektif dari pengadilan nasional jika ada pelanggaran terhadap hak-hak yang dijamin oleh ketentuan hukum-hukum positif. Para pihak yang mengalami proses peradilan, juga termasuk proses upaya hukum peninjauan kembali diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengajukan tinjauan atau koreksi terhadap putusan yang dirasa kurang adil bagi pihak yang bersangkutan.

Mengenai upaya hukum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dibagi menjadi 2 jenis yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum banding dan kasasi adalah upaya hukum biasa, sedangkan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa. Dalam penelitian ini penulis lebih mensoroti upaya hukum luar biasa yakni peninjauan Kembali. Khusus peninjauan kembali, Indonesia sudah sejak lama menerapkannya dan tentunya telah terdapat banyak perkembangan karena pada dasarnya aparatur hakim adalah manusia yang tidak luput dari kekhilafan serta kekurangan.

Lembaga *Herziening* atau lebih dikenal sebagai Peninjauan Kembali di dalam hukum didefinisikan dengan upaya hukum yang mengatur tentang pedoman untuk melakukan peninjauan kembali terhadap suatu putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³ Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa karena upaya hukum ini bertentangan dengan asas kepastian hukum. Upaya hukum peninjauan kembali dikatakan bertentangan dengan asas kepastian hukum dikarenakan upaya hukum ini meninjau kembali suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*gezag van gewijsde*) tidak bisa diubah lagi, asas kepastian hukum itu disebut *ne bis in idem* yang artinya tidak boleh terjadi dua kali putusan terhadap satu kasus yang sama antara dua pihak yang sama.⁴

Jadi, peninjauan kembali ini adalah upaya hukum yang lebih berorientasi terhadap tujuan hukum yaitu keadilan. Karena pada dasarnya majelis hakim sebagai pembuat keputusan juga seorang manusia yang tidak luput dari kekhilafan.

Terbentuknya suatu lembaga peninjauan kembali dalam perkara pidana mengacu pada pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal 263 ayat (1) menyatakan bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang sudah *inkracht* ke Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Kemudian, untuk para pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Kemudian dapat disimpulkan bunyi dari pasal 263 ayat (1) adalah:⁵

1. Permintaan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan dimohonkan untuk putusan pemidanaan;

³ Hadari Djenawi Tahir, *Herziening di dalam KUHP*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm 8

⁴ Ibid.

⁵ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana (Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat)*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm 7-8

2. Peninjauan Kembali hanya dapat dimohonkan untuk putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Permintaan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya oleh terpidana atau ahli warisnya saja.

Sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengadakan lembaga peninjauan kembali dan dijalankan oleh Mahkamah Agung telah menunjukkan bahwa peninjauan kembali adalah sangat penting keberadaannya bagi para pencari keadilan.⁶ Sebagai contohnya kasus Sengkon dan Karta tahun 1977 dan Kasus Devid Eko Priyanto dan Imam Chambali tahun 2008 merupakan kasus di mana mereka setelah diputus bersalah, mereka mengajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dengan dasar alasan terdapat bukti baru yang menunjukkan bahwa mereka yang diputus bersalah bukanlah pelaku kejahatan seperti yang telah didakwakan dan akhirnya mereka dibebaskan.

Dalam perjalanannya, lembaga peninjauan kembali sebagai *extraordinary remedy* telah mengalami beberapa masalah yang tidak sesuai dengan dasar hukumnya, terutama dari pihak pemohonnya. Selain pihak terpidana yang merasa tidak bersalah atau tidak merasa melakukan tindak pidana dan ahli warisnya, terdapat pihak lain yang saat ini dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yakni pihak Jaksa Penuntut Umum. Terdapat beberapa permohonan Peninjauan Kembali yang telah diajukan oleh Penuntut Umum diantaranya kasus Muchtar Pakpahan tahun 1996, Kasus Ram Gulumal tahun

⁶ Parman Soeparman, **Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 6

2001, serta Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir yang dilakukan oleh Polycarpus Budihari Priyanto tahun 2008.⁷

Dari beberapa kasus yang telah disebutkan oleh penulis diatas, menunjukkan suatu ketidak persesuaian antara hukum yang tertulis. Hukum yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur secara eksplisit pihak-pihak yang dapat melakukan peninjauan kembali adalah pihak terpidana atau ahli warisnya. Pasal tersebut sama sekali tidak menyebutkan pihak dari korban ataupun Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Hal tersebut menunjukkan pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan kesempatan Peninjauan Kembali kepada pihak korban maupun Jaksa Penuntut Umum.

Dalam praktiknya selama ini, sebagian besar hasil putusan dari Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dikabulkannya permohonan kemudian terdakwa dijatuhi pidana. Contoh dari putusan seperti itu terjadi pada kasus Muchtar Pakpahan atas kasus penghasutan. Muchtar Pakpahan pada awalnya dinyatakan bersalah dan dipidana dengan kurungan 3 tahun penjara.⁸ Kemudian setelah melalui proses upaya hukum hingga Peninjauan Kembali, Muchtar Pakpahan akhirnya dipidana dengan 4 tahun penjara.

Kasus berikutnya adalah kasus pembunuhan alm. Munir atas nama terdakwa Polycarpus Budihari Priyanto. Pada awalnya putusan pengadilan tingkat pertama Polycarpus diputus bersalah. Kemudian kedua belah pihak

⁷ Alfin Sulaiman, **Pergeseran Fungsi PK Sebagai Offender Oriented Ke Arah Victim Oriented**, Suara Pembaca, 29 Juli 2009

⁸ Putusan Mahkamah Agung No. 55 PK/ Pid/ 1996

mengajukan banding serta kasasi namun hasil putusan tersebut tetap sama yakni Polycarpus tetap dipidana sampai akhirnya menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali. Pada Peninjauan Kembali atas nama pemohon Polycarpus, ia diputus bebas. Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum Kembali mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali yang membebaskan Polycarpus tersebut. Hasil dari Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum ini menghasilkan suatu putusan Pemidanaan yang lebih berat. Pidana tersebut adalah 20 tahun penjara atas tindak pembunuhan berencana serta memalsukan surat.

Hal tersebut menunjukkan suatu permasalahan yuridis dalam hukum acara pidana. Dimana tidak diaturnya Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dan masalah tersebut terwujud dalam beberapa putusan. Terkait dengan hal itu sudah tentu menimbulkan permasalahan antara tercapainya keadilan dengan mewujudkan kepastian hukum. Berkaitan dengan persoalan hak untuk mengajukan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang telah dituliskan oleh penulis diatas, hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk melakukan sebuah penelitian terhadap suatu urgensi Jaksa Penuntut Umum dapat Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali.

Sebelum melanjutkan pada permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini, permasalahan yang sering muncul dalam penulisan karya ilmiah adalah masalah keaslian atau orisinalitas penulisan. Sebelum melakukan penelitian tentang urgensi upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, penulis menemukan

penelitian sejenis dengan penelitian ini. Adapun penelitian tersebut antara lain:

Tabel I Tabel Orisinalitas Penelitian

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2014	Yayang Susila Sakti/ Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum: Antara Kepastian dan Keadilan	Penelitian ini menjelaskan alasan bagi Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali dan konsep pengaturan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum yang akan datang.
2.	2015	Yading Arianto/ Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Hak Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Keadilan Hukum Di Indonesia	Penelitian ini membahas tentang hak jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali dalam perspektif keadilan hukum di Indonesia dikaitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peninjauan Kembali

				terutama pasal 263
				KUHAP

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa penelitian terdahulu. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum terkait dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali sesuai pasal 263 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perbedaannya adalah pada penelitian ini penulis meneliti dan membahas urgensi atau pentingnya Jaksa Penuntut Umum untuk dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali dan penelitian sebelumnya membahas tentang hak dan alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan peninjauan kembali.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas serta lebih mengarahkan pembahasan, maka berdasar uraian di atas penulis merumuskan masalah yang diangkat adalah apa urgensi Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan urgensi Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Sebagai kontribusi bagi para akademisi untuk memahami urgensi Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali tersebut sebagai ilmu pengetahuan bagi mahasiswa berdasarkan hukum formil dan materil serta memberikan wacana yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum terkait hukum acara pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam tentang urgensi Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hukum acara pidana di Indonesia dan sebagai bahan evaluasi tentang pengetahuan yang telah diserap dalam perkuliahan oleh mahasiswa dengan realitas kondisi serta evaluasi yang ada di Indonesia.

Dapat meningkatkan kompetensi, kecerdasan intelektual dan emosional mahasiswa terkait dengan pengalaman mengetahui urgensi Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hukum acara pidana di Indonesia.

b. Bagi Pembuat Kebijakan

Sebagai bahan tambahan alternatif dan referensi dalam membuat peraturan yang akan datang dalam hal pihak-pihak yang dapat

mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam peraturan hukum acara pidana di Indonesia.

c. Bagi Fakultas atau Perguruan Tinggi

1. Sebagai bahan tambahan alternatif dan referensi materi kuliah serta penyempurnaan kurikulum pembelajaran agar lebih efektif dan efisien.
2. Sebagai tambahan referensi perkuliahan mahasiswa terkait dengan urgensi peninjauan kembali dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hukum acara pidana di Indonesia.

C. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penelitian yang akan dilakukan, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi kajian pustaka tentang penjelasan teori-teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan tinjauan mengenai Sistem Peradilan Pidana, Hukum Acara Pidana, Jaksa Penuntut Umum, Upaya Hukum, Pembuktian, Penafsiran Hukum, Putusan Pengadilan, Prinsip Universal Hak Atas Peradilan yang Adil Dan Tidak Memihak (Fair Trial), Konsep Adil dalam Fair Trial, Teori Tujuan Hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Adalah metode penelitian yang diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV : METODE PENELITIAN

Adalah pembahasan mengenai urgensi Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hukum acara pidana di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Criminal Justice system atau Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem kerja untuk menanggulangi kejahatan. Menurut Mardjono, adalah sebuah sistem untuk menanggulangi dan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas toleransi masyarakat.⁹ Sistem Peradilan Pidana bertujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. Selain mencegah, juga menyelesaikan suatu kejahatan tanpa pelaku mengulang lagi kejahatan tersebut. Dengan tujuan tersebut, empat komponen dalam sistem peradilan pidana yakni, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan membentuk suatu “*integerated criminal justice system*”. Apabila tidak dilakukan, diperkirakan akan terjadi kerugian antara lain:¹⁰

1. Kesulitan menilai keberhasilan atau kegagalan tiap instansi dalam menjalankan tugas.
2. Kesulitan memecahkan masalah-masalah pokok tiap instansi.
3. Tanggung jawab tiap instansi kurang jelas maka efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana kurang diperhatikan.

⁹ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, dikutip dari *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, 1994, Hlm. 84-85

¹⁰ Ibid

2. Pendekatan dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan terdapat pendekatan normatif, pendekatan administratif, dan pendekatan sosial. Pendekatan normatif mengangap empat komponen sistem peradilan pidana sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga empat aparatur tersebut merupakan bagian dari sistem penegakkan hukum semata.¹¹

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur dalam sistem peradilan pidana sebagai salah satu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja. Mekanisme itu baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal. Mekanismenya disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.¹²

Pendekatan sosial memandang empat aparatur sistem peradilan pidana adalah bagian dari suatu sistem sosial. Masyarakat secara keseluruhan juga turut serta bertanggung jawab atas keberhasilan maupun ketidakberhasilan para aparatur penegak hukum tersebut dalam menjalankan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

Dalam sistem peradilan pidana terdapat dua model menurut pendekatan normatif, yakni *crime control model* dan *due process model*.¹³

Crime control model menunjukkan bahwa pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting yang harus diwujudkan dalam proses peradilan pidana, sehingga yang diutamakan adalah keefisiensian proses

¹¹Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm. 7

¹²Ibid

¹³Ibid

peradilan pidana. Efisien disini menekankan pada kecepatan dan kepastian pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh penegak hukum yang berwenang. Untuk mempercepat pemrosesan tersangka atau terdakwa di pengadilan, model ini menggunakan asas *presumption of guilty*, yakni praduga bersalah. Dalam *crime control model*, terdapat nilai-nilai yang melandasi yakni tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses pengadilan.

Selain *crime control model*, terdapat juga model lain yakni, *Due Process Model*. Dalam *Due Process Model*, penegakkan hukum terhadap kejahatan harus mengutamakan efektifitas dari suatu penegakkan hukum. Efektifitas tersebut untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses pengadilan. *Due Process Model* menggunakan prinsip praduga tak bersalah yang mana hal ini menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efektif. Model ini fokus pada temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal dalam undang-undang. Tiap temuan fakta dan prosedur tersebut adalah penting maka tidak terabaikan. Fakta-fakta tersebut ditemukan dari tahapan-tahapan yang ketat mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Adapun nilai-nilai lainnya yang melandasi *Due Proses Model* adalah formal *adjudicative* dan *adversary fact findings*.¹⁴ Hal itu berarti pada setiap kasus, tertuduh

¹⁴ Romli Atmasasita, Op.cit. Hlm. 12

harus diajukan ke muka pengadilan yang adil dan tidak memihak.¹⁵

Tersangka berhak diperiksa sesudah hak-haknya terpenuhi dan diperbolehkan mengajukan pembelaan.

Telah disampaikan sebelumnya, sistem peradilan pidana adalah rangkaian proses pemeriksaan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana terdapat beberapa tahap dan disetiap tahapannya terdapat aparaturnya penegak hukum yang berwenang.

Pada tahap pertama adalah tahap penyelidikan dan ditangani oleh kepolisian atau pejabat negara yang berwenang. Tahap penyelidikan ini merupakan tahap untuk menentukan apa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Setelah diketahui hal tersebut adalah tindak pidana, maka berlanjutlah ke tahap berikutnya yakni tahap penyidikan. Tahap penyidikan ditangani oleh pihak kepolisian atau pejabat negara yang berwenang. Setelah tahap penyidikan berlanjut ke tahap penuntutan yang ditangani oleh jaksa penuntut umum, kemudian dari penuntutan naik ke tahap peradilan yang mana dalam tahap ini ditangani oleh hakim. Dalam pengadilan hakim memeriksa dan mengeluarkan putusan, setelah putusan inkraht, putusan tersebut harus dilaksanakan, jika putusan tersebut menyatakan terdakwa bersalah dan dipidana penjara maka tahapan selanjutnya dialihkan ke lembaga permasyarakatan.

B. Kajian Umum Mengenai Hukum Acara Pidana

Keberadaan Hukum Acara Pidana sangat dibutuhkan karena sifat essensialnya dalam penegakkan Hukum Pidana Materiil. Hukum Pidana

¹⁵ Ibid

Matreuil akan kehilangan sifat memaksanya tanpa adanya dukungan Hukum Acara Pidana. Dengan kata lain Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formil adalah hukum yang menjalankan hukum pidana materiil. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tidak memberikan definisi hukum acara pidana. Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya menyebutkan beberapa bagian dari hukum acara pidana antara lain: pengertian penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan serta penahanan. Menurut Susilo Yuwono, hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat antara lain:¹⁶

- a. Hak dan kewajiban dari yang tersangkut dalam proses pidana;
- b. Tata cara dari proses acara pidana;
- c. Tindakan-tindakan yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana;
- d. Tata cara menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan;
- e. Tata cara melakukan pemeriksaan di pengadilan
- f. Tata cara melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan untuk menyelenggarakan penegakan dan kepastian hukum. Selain itu juga menghindari tindakan masyarakat yang semena-mena. Dengan kata lain hukum acara pidana adalah

¹⁶ Yan Pramadya Puspa, **Kamus Hukum (Edisi Lengkap)**, Aneka, Semarang, 1997, hlm. 441-442

reaksi dari masyarakat atas terjadinya tindak pidana yang kemudian reaksi tersebut di wakikan kepada negara dengan ketentuan hukum acara pidana.

Hukum acara pidana pada dasarnya lebih melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa selama proses pemeriksaan.

1. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana

Tujuan hukum acara pidana telah dituliskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP Tahun 1982 yang mana tujuannya adalah mencari dan mendapatkan sedikit-tidaknya mendekati kebenaran materiil.

Kebenaran materiil itu sendiri adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnnya dari suatu perkara pidana. Kebenaran materiil didapatkan dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana yang tepat dan jujur.

Tujuan kedua adalah mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum pidana materiil. Selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan. Pemeriksaan tersebut guna menentukan terbuhtnya suatu tindak pidana telah dilakukan. Kemudian, apakah memang orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Selain Pedoman

Pelaksanaan KUHAP Tahun 1982, tujuan hukum acara pidana juga dirumuskan dalam konsiderans huruf c KUHAP. Konsideran itu merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh KUHAP. Tujuannya yaitu pertama, agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Kedua, untuk meningkatkan kinerja para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing. Kesesuaian tersebut mengacu pada tegaknya hukum. Tidak hanya hukum tetapi juga keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta

kepastian hukum.¹⁷ Arah tersebut ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila. Menurut tujuan dalam konsideran tersebut maka dapat dirumuskan bahwa landasan tujuan KUHAP yakni peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang lebih dititikberatkan kepada peningkatan penghayatan akan hak dan kewajiban hukum, meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum untuk tegaknya hukum dan keadilan, melindungi harkat dan martabat manusia, menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, arti dan tujuan kehidupan masyarakat adalah mencari dan mewujudkan ketentraman serta ketertiban.¹⁸

Hukum pidana terbagi menjadi dua macam, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Fungsi dari hukum pidana materiil adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang termasuk kejahatan. Sedangkan, fungsi hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan. Artinya mengatur bagaimana cara negara dengan aparturnya dapat menjalankan wewenang untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan pidana.¹⁹

¹⁷ Konsideran Huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi "Bahwa pembangunan hukum nasional yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing, ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila"

¹⁸ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1**, Pustaka Kartini, 2003 h. 62

¹⁹ Andi sofyar, Abd. Asis, **Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar**, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 6-7

Menurut Bambang Poernomo bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya ialah:²⁰

- a. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran
- b. Menerapkan hukum dan keputusan berdasarkan keadilan
- c. Melaksanakan keputusan secara adil.

2. Prinsip-prinsip Dalam Hukum Acara Pidana

Prinsip-prinsip dalam hukum acara pidana digunakan semata-mata untuk melindungi hak-hak para pihak dalam setiap tahap dalam persidangan. Prinsip-prinsip yang ada dalam hukum acara pidana antara lain:²¹

a. Prinsip Legalitas

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karakternya adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Hal tersebut terdapat dalam konsiderasns Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana huruf a.

b. Prinsip Keseimbangan

Dalam setiap penegakkan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi dalam perlindungan terhadap harkat dan

²⁰ Bambang Pramono, **Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana**, Yogyakarta, Liberty, 2008, h. 29

²¹ Andi Sofyan, Abd. Asis, Op.cit, hlm. 18

martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

c. Prinsip Unifikasi

Dalam konsiderans KUHAP huruf b demi pembangunan di bidang hukum perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional. Dan hal tersebut berwujud mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkaian pelaksanaan pelaksanaan secara nyata dalam wawasan nusantara.

d. Prinsip Diferensiasi Fungsional

Diferensiasi fungsional adalah penjelasan dan penegasan pembagian tugas dan wewenang masing-masing antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional.

e. Prinsip Koordinasi

Yang dimaksud dengan koordinasi yaitu *built in control*, artinya pengawasan dilaksanakan berdasarkan struktural oleh masing-masing instansi menurut jenjang pengawasan (*span of control*) oleh atasan ke bawahan.

3. Sumber dan Dasar Hukum Acara Pidana

Pelaksanaan hukum acara pidana Indonesia berdasarkan pada sumber-sumber hukumnya, yakni sebagai berikut:²²

²² Ibid. Hlm. 12

1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 24 ayat (1) A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
4. Segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses hukum acara pidana dan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
5. Surat edaran atau Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia.
6. Yurisprudensi atau putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait masalah hukum acara pidana.
7. Doktrin atau pendapat para ahli hukum di bidang hukum acara pidana.

C. Kajian Umum tentang Jaksa Penuntut Umum

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana membedakan istilah antara jaksa dan penuntut umum. Hal tersebut terdapat dalam Bab I tentang Ketentuan Umum khususnya pasal 1 angka 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Yang menerangkan bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang memiliki wewenang berdasar Undang-Undang untuk berlaku sebagai penuntut umum. Juga melaksanakan putusan pengadilan yang sudah *Inkracht*;
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang berwewenang untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim.

Dari ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang memiliki wewenang berdasar Undang-Undang untuk berlaku sebagai

penuntut umum. Selain penuntut umum Juga melaksanakan putusan pengadilan yang sudah *Inkracht*.²³

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia khususnya pada pasal 1 butir 1 mendefinisikan Jaksa sebagai pejabat fungsional yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk dapat bertindak sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain yang didasarkan pada undang-undang. Jika penuntut umum dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mendefinisikan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan hakim.

1. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Setelah melihat definisi dari pasal 1 butir 6a dan 6b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka dapat ditarik kesimpulan mengenai tugas serta wewenang dari jaksa antara lain:

1. Sebagai penuntut umum jaksa melakukan penuntutan serta menjalankan penetapan pengadilan,
2. Melaksanakan setiap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum memiliki wewenang antara lain:

²³ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hlm. 423

1. Menerima kemudian memeriksa berkas perkara penyidikan dari petugas penyidik ataupun penyidik pembantu,
2. Melaksanakan pra penuntutan apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan pada berkas penyidikan dengan memperhatikan peraturan dalam KUHAP khususnya pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik,
3. Memberikan perpanjangan penahanan dalam rangka pemeriksaan dalam penyidikan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, merubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan kepada penyidik,
4. Membuat surat dakwaan,
5. Melimpahkan suatu perkara ke pengadilan,
6. Memberikan pemberitahuan kepada terdakwa dan saksi tentang waktu persidangan
7. Melakukan tahap penuntutan,
8. Menutup perkara demi kepentingan umum,
9. Melakukan tindakan lain dalam lingkup dan tanggung jawab penuntut umum sesuai atau berdasarkan ketentuan undang-undang,
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, jaksa penuntut umum menggunakan kapasitasnya sebagai salah satu pihak yang mewakili negara dengan kata lain kepentingan umum dalam penyelesaian perkara pidana. Hal ini dimaknai bahwa jaksa penuntut umum mengajukan

peninjauan kembali bukan sebagai pihak yang mewakili kepentingan pribadi jaksa ataupun Lembaga Kejaksaan, melainkan untuk kepentingan umum atau negara. Dalam hukum acara pidana Indonesia memang secara eksplisit tidak mengatur Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, tetapi hal tersebut juga tidak dimaknai sebagai suatu pelarangan terhadap Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

D. Kajian Umum Mengenai Upaya Hukum

Menurut R. Atang Ranoemihardja upaya hukum adalah suatu sarana hukum untuk pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat.²⁴ Dalam Pedoman KUHAP definisi upaya hukum yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan.²⁵ KUHAP membedakan upaya hukum menjadi 2 jenis yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Bading dan kasasi adalah upaya hukum biasa. Kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah upaya hukum luar biasa.

Selain upaya hukum yang disebutkan di atas masih terdapat upaya hukum lainnya diatur di dalam KUHAP yakni upaya hukum verset atau upaya hukum perlawanan. Upaya hukum tidak terbatas yang hanya terdapat di dalam KUHAP tetapi juga ada upaya hukum yang diatur di luar KUHAP yaitu grasi.

²⁴ R. Atang Ranoemihardjo, **Hukum Acara Pidana**, Tarsito, Bandung, 2006, hlm. 123

²⁵ Departemen Kehakiman RI, **Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Cet. Keenam, 2002, h. 159

Grasi diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Grasi.

1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa terdapat pada Bab XVII Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bab XVII tersebut terbagi menjadi 2 bagian, bagian pertama pasal 233 sampai dengan pasal 243 mengatur tentang pemeriksaan di tingkat banding dan pasal 244 sampai dengan pasal 258 mengatur tentang pemeriksaan di tingkat kasasi. Upaya hukum biasa adalah hak terdakwa dan penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang belum *inkracht*. Penjelasan upaya hukum adalah:²⁶

1. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya.
2. Untuk kesatuan dalam pengadilan
3. Sebagai perlindungan terhadap tindak sewenang-wenang hakim atau pengadilan.

a. Upaya Hukum Banding

Pemeriksaan banding adalah pemeriksaan perkara pada tingkat II atau pengadilan tinggi, maka pengertian banding menurut J. C. T. Simorangkir adalah suatu alat hukum (*rechtsniddel*) yang merupakan hak terdakwa dan hak penuntut umum untuk memohon, supaya putusan pengadilan negeri diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi. Tujuan dari hak ini

²⁶ Andi sofyon, Abd. Asis, op.cit. hlm. 269

adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan pertama.²⁷

Prinsipnya putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum banding tetapi, berdasarkan situasi dan kondisi, demi kepentingan hukum, keadilan, dan kebenaran, dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan upaya kasasi secara khusus terhadap putusan bebas. Hal atau keadaan khusus tersebut yang kemudian akan didasarkan pada yurisprudensi, yurisprudensi tersebut yakni putusan MA²⁸ yang memperbolehkan dan mengabulkan upaya kasasi terhadap putusan pembebasan pengadilan tingkat pertama. Permohonan upaya hukum banding ini diajukan ke pengadilan tinggi dalam jangka waktu tujuh hari setelah putusan dibacakan apabila terdakwa hadir, ataupun tujuh hari setelah putusan diberitahukan secara resmi kepada terdakwa apabila terdakwa tidak hadir, hal tersebut dikemukakan dalam pasal 263 kitab undang-undang hukum acara pidana.

Pemeriksaan banding juga dapat disebut sebagai revisi, karena merupakan suatu penilaian baru (*judicium novum*), jadi dalam pemeriksaan banding oleh pengadilan tinggi dapat memanggil dan memeriksa saksi-saksi baru, ahli surat-surat bukti baru, hal tersebut dikemukakan dalam pasal 238 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka dari itu tujuan dari upaya hukum banding atas putusan pengadilan negeri adalah menguji

²⁷ J.C.T. Simorangkir, dkk, **Kamus Hukum**, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hlm. 25-26

²⁸ Lihat Putusan MA No. 275/ Pid/ 1983 tanggal 29-12-1983

putusan pengadilan negeri (tingkat pertama) tentang ketepatan atau bersesuaian dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu.

b. Upaya Hukum Kasasi

Menurut Wirjono Prodjodikoro kasasi adalah pembatalan, yaitu suatu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain.²⁹ Jadi kasasi sendiri berarti pembatalan dan hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai yang meakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain.

Upaya hukum kasasi diatur dalam pasal 244 sampai 258 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Putusan yang dapat dilawan dengan upaya kasasi adalah semua putusan terakhir, selain putusan Mahkamah Agung dan Putusan Bebas. Namun dalam prakteknya kini putusan bebas dapat dilawan dengan upaya hukum kasasi, tetapi putusan tersebut adalah putusan bebas tidak murni. Putusan bebas yang dimaksud dalam pasal 244 KUHP tersebut adalah putusan bebas murni, sebab jika putusan tidak murni masih bisa dilawan dengan upaya hukum kasasi.

Dalam doktrin hukum terdapat istilah bebas murni (*zuivere vrijspraak*) dan putusan bebas tidak murni (*niet zuivere*

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, cet. Ketujuh, Bandung, Sumur, 2003, hlm.10

vrijspraak).³⁰ Dalam praktiknya yang dapat dimohonkan kasasi adalah putusan bebas tidak murni. Putusan bebas tidak murni adalah putusan yang amarnya membebaskan terdakwa yang didasarkan atas penafsiran yang keliru. Keliru disini terhadap sebutan tindak pidana yang didakwakan. Maksudnya didasarkan pada tidak terbuktinya salah satu unsur perbuatan yang didakwakan.³¹

Pengajuan kasasi didasarkan pada alasan-alasan yang telah dirumuskan dalam pasal 255 KUHAP guna menentukan:

1. Benar dan tidaknya suatu peraturan hukum atau diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, maka Mahkamah Agung sendiri yang akan mengadili perkara tersebut.
2. Benar atau tidaknya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang. Setelah itu Mahkamah Agung menetapkan agar pengadilan yang bersangkutan memeriksa kembali putusannya. Atau Mahkamah Agung menetapkan dengan alasan lain untuk diperiksa oleh pengadilan setingkat lainnya.
3. Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara jika pengadilan melebihi wewenangnya.

³⁰ Adami Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan dalam Praktik Hukum Pidana*, Bayu Media, Malang, 2013, Hlm. 236

³¹ Ibid

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa dalam hukum acara pidana datur dalam Bab XVII Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Upaya hukum luar biasa memiliki perbedaan dengan upaya hukum biasa. Perbedaan yang mencolok dari kedua upaya hukum ini adalah obyek yang dimohonkan untuk diperiksa, yakni suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Perbedaan tersebutlah yang menjadikan upaya ini dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena obyek yang diperiksa merupakan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Upaya hukum luar biasa yang terdapat dua macam. Yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan yang kedua adalah peninjauan kembali.

1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Kasasi demi kepentingan hukum dapat dimohonkan terhadap semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kecuali putusan dari Mahkamah Agung dan hanya terbatas pada putusan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi.³² Menurut pasal 259 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur para pihak yang dapat mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum ini adalah Jaksa Agung karena jabatannya. Untuk terpidana atau ahli warisnya tidak diperkenankan untuk mengajukan upaya hukum ini.

Jaksa Agung dapat mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum berdasarkan pada laporan-laporan atau pemberitahuan dari

³² M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali**, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 608

kejaksaan setempat apabila ada suatu putusan yang perlu untuk diperiksa dalam upaya hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Jika pendapat atau pemberitahuan oleh kejaksaan setempat disetujui oleh Jaksa Agung, maka Jaksa Agung memberikan kuasa kepada kejaksaan setempat untuk mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum atas nama Jaksa Agung. Demi tegaknya hukum dan kepastian hukum, menurut pasal 259 ayat (1), kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan satu kali.

2. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali atau Lembaga *Herziening* di dalam hukum diartikan sebagai upaya hukum luar biasa untuk meninjau kembali putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³³ Maka *herziening* adalah suatu peninjauan kembali terhadap putusan di semua tingkat pengadilan seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap kecuali terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum sesuai dengan yang tertulis pada pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa karena sebenarnya upaya hukum ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menentukan bahwa putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*gezag van gewijsde*) tidak bisa diubah lagi, asas kepastian hukum itu disebut *neb is in idem* yang artinya tidak

³³ Hadari Djenawi Tahir, *Herziening di dalam KUHAP*, Bandung, Alumnini 2002, hlm. 8-9

boleh terjadi dua kali putusan terhadap satu kasus yang sama antara 2 pihak yang sama.³⁴ Namun upaya hukum peninjauan kembali ini lebih berorientasi terhadap tujuan hukum yakni keadilan. Karena pada dasarnya majelis hakim sebagai pembuat keputusan juga seorang manusia yang tidak luput dari kekhilafan. Maka dari itu, untuk mengajukan peninjauan kembali harus melalui atau melengkapi persyaratan-persyaratan yang begitu ketat.

Di dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal dengan adanya istilah *novum*. *Novum* tersebut adalah salah satu dasar untuk permintaan peninjauan kembali. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengenal istilah tersebut. *Novum* berasal dari bahasa latin yang artinya baru. Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Novum* adalah alasan atau peristiwa yang baru dikemukakan atau baru muncul (ditemukan) dari suatu masalah yang sedang diperkarakan, bukti-bukti baru.

Dengan adanya *novum* maka terpidana yang sedang menjalani hukumannya dapat melakukan suatu upaya hukum yakni salah satunya peninjauan kembali. Pengertian *novum* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan kesimpulan bahwa *novum* tersebut hanya dapat digunakan terhadap suatu kasus yang telah mendapat putusan *inkracht* dari pengadilan. Putusan *Inkrach* tersebut adalah putusan yang paling akhir dari majelis hakim di pengadilan dan

³⁴ Pande Made Ristya Yunitya, **Analisis Yuridis Novum Dalam Bentuk Error In Persona Korban Sebagai Dasar Permohonan Pemeriksaan Peninjauan Kembali Perkara Pembunuhan Dengan Terpidana Imam Chambali Alias Kemat dan Upaya Hukum Terpidana Untuk Memperoleh Rehabilitasi dan Ganti Rugi** (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor 89 PK/Pid/2008)

bersifat tetap serta mengikat terhadap pihak-pihak dalam putusan tersebut. Pihak-pihak tersebut tidak memiliki pilihan lain selain menjalankan putusan majelis hakim tersebut. Jika para pihak menolak, penegak hukum memiliki kewenangan secara paksa terhadap mereka untuk menjalankan putusan tersebut.

Untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali terdapat beberapa alasan-alasan sesuai dalam pasal 263 ayat 2, yang diantaranya adalah:

1. Terdapat keadaan baru atau *novum* yang menimbulkan dugaan kuat bahwa terpidana dapat menghasilkan putusan bebas;
2. Terdapat pertentangan dalam putusan yang satu dengan yang lain;
3. Terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata dalam putusan.

a. Sejarah Perkembangan Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali (PK)/ *Herziening* merupakan salah satu upaya hukum yang menuai banyak kontroversi oleh karena itu upaya hukum ini patut disebut sebagai upaya hukum luar biasa.

Peninjauan Kembali awalnya dilakukan pada kasus Sengkon dan Karta yang terjadi di Jawa Barat pada tahun 1977. Kasus Sengkon dan Karta ini merupakan kasus perampokan serta pencurian yang terjadi pada pasangan suami istri di desa Bojongan, Bekasi. Kasus Sengkon dan Karta ini merupakan kasus salah tangkap, yang kemudian Sengkon dipidana 12 tahun penjara dan Karta 7 tahun

penjara.³⁵ Di dalam penjara, Sengkon dan Karta bertemu dengan Gunel yang mengaku bahwa dia bersama dengan teman-temannya telah membunuh pasangan suami istri yang dituduhkan sebagai korban dari perbuatan Sengkon dan Karta. Pengakuan Gunel tersebut menjadi dasar Kejaksaan Agung mengajukan penangguhan pelaksanaan menjalani hukuman bagi Sengkon dan Karta dan pada tahun 1980 Gunel dijatuhi pidana 12 tahun penjara. Setahun berikutnya yakni pada tahun 1981 pengacara Albert Hasibuan, mengajukan upaya hukum dan Ketua Mahkamah Agung Oemar Seno Adji memerintahkan agar keduanya dibebaskan lewat jalur Peninjauan Kembali.³⁶

Sebelum KUHAP dibentuk dan disahkan pada tahun 1981 upaya hukum Peninjauan Kembali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan Peninjauan Kembali awalnya diatur dalam pasal 15 Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.³⁷ Pasal 15 Undang-undang No. 19 Tahun 1964 mengatur bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali adalah upaya yang dapat ditempuh untuk memperbaiki putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang. Menurut penjelasannya mengatur Peninjauan Kembali merupakan

³⁵ Joe, Sengkon dan Karta, **Sebuah Ironi Keadilan**, 26 April 2009, <http://www.kompasonline.com>. Diakses pada 22 Januari 2016 pukul 15.13 WIB.

³⁶ Ibid.

³⁷ Andi Sofyan, Abd. Asis, op.cit, Hlm. 290

alat hukum yang istimewa yang mana syarat-syaratnya ditetapkan dalam Hukum Acara Pidana dan salah satu syarat tersebut adalah apabila terdapat keadaan baru atau novum yang pada saat itu tidak muncul pada pengadilan.³⁸

Selang satu tahun berikutnya, pada tahun 1965 dikeluarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagai turunan dari Undang-undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.³⁹ Dalam undang-undang ini memperkuat adanya upaya hukum Peninjauan Kembali yang mana diatur dalam 2 pasal yakni pada pasal 31 dan pasal 52. Kedua pasal tersebut menegaskan serta mengatur Mahkamah Agung berhak memeriksa permohonan Peninjauan Kembali. Namun dalam Undang-undang tersebut masih belum diatur mengenai tata cara pengajuan permohonan Peninjauan Kembali.

Kedua pasal tersebut dianggap pengaturannya masih terlalu minim, kemudian menurut kondisi tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1967 menghimbau pengadilan-pengadilan untuk tidak menerima permohonan Peninjauan Kembali dikarenakan saat itu belum terdapat peraturan yang mengatur tata cara, syarat dan lain

³⁸ Penjelasan pasal 15 Undang-undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

³⁹ Andi Sofyan, Abd. Asis, Opcit. Hlm. 290

sebagainya secara detail.⁴⁰ Namun pada saat itu, cukup banyak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan, akhirnya pada tahun 1969 Mahkamah Agung mencabut SEMA dan mengatur mengenai syarat dan tata cara permohonan Peninjauan Kembali melalui PERMA No. 1 Tahun 1969. Peraturan tersebut berisi 8 pasal yang kemudian menjadi dasar kerangka pengaturan mengenai Peninjauan Kembali selanjutnya, baik Peninjauan Kembali dalam perkara di bidang pidana maupun perkara di bidang lainnya.

Khusus mengenai Peninjauan Kembali diatur dalam pasal 3 dan 4 dalam PERMA No. 1 Tahun 1969 yang mana pasal 3 mengatur tentang dasar alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya, pada pasal 4 mengatur tentang pihak yang dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yakni terpidana atau pihak yang berkepentingan, atau Jaksa Agung, serta tata cara pengajuan permohonan Peninjauan Kembali.

Hal yang diatur dalam pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 1969 memiliki kesamaan dengan pasal 263 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 atau yang saat ini dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Namun pada pasal 4 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 1969 yang mana mengatur tentang pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali memiliki perbedaan dengan pasal 263 ayat 1. Pada pasal 4 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun

⁴⁰ Ibid.

1969, memberikan hak kepada Jaksa Agung untuk mengajukan Peninjauan Kembali sedangkan pada pasal 263 ayat 1, pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali hanyalah pihak terpidana serta ahli warisnya.

Tiga bulan kemudian, Mahkamah Agung menunda pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 1969 hingga waktu yang tidak ditentukan melalui SEMA No. 18 Tahun 1969. Tahun 1970 Undang-undang No. 19 Tahun 1964 diganti dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1970.⁴¹ Dalam Undang-undang ini ketentuan Peninjauan Kembalinya masih sama seperti Undang-undang No. 19 Tahun 1964. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 belum mengatur secara detil persyaratan dan tata cara permohonan Peninjauan Kembali. Untuk pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali diatur dalam pasal 21, yang mana pihak tersebut adalah terpidana atau ahli warisnya.

Terbitnya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 menjadi latar belakang Mahkamah Agung untuk menerbitkan PERMA baru, yakni PERMA No. 1 tahun 1971. PERMA tersebut diterbitkan untuk membatalkan berlakunya SEMA No. 18 Tahun 1969 yang menunda pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 1969.

Alasan Mahkamah Agung untuk melakukan pembatalan tersebut, dikarenakan pada masa itu sedang dibahas suatu rancangan undang-undang yang akan mengatur hukum acara termasuk

⁴¹ Ibid

Peninjauan Kembali. Mahkamah Agung beranggapan bahwa sebaiknya pelaksanaan pemeriksaan Peninjauan Kembali menunggu terbitnya undang-undang yang sedang dibahas rancangannya. Tetapi hingga tahun 1976 rancangan undang-undang yang dimaksud tidak kunjung terbit dan hal tersebut menggerakkan Mahkamah Agung untuk mencabut PERMA No. 1 Tahun 1971 dan PERMA No. 18 Tahun 1969 kembali berlaku melalui PERMA No. 1 Tahun 1976.

Hingga tahun 1980 undang-undang yang mengatur tentang hukum acara pemeriksaan Peninjauan Kembali belum juga diterbitkan. Akhirnya, Mahkamah Agung mengadakan rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas masalah pengaturan hukum acara pemeriksaan Peninjauan Kembali. Dalam rapat tersebut disepakati untuk sementara waktu pengaturan Peninjauan Kembali diatur dalam PERMA. Setelah rapat kerja tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 1980. PERMA tersebut lebih komprehensif dari PERMA No. 1 Tahun 1969. Dalam PERMA No. 1 Tahun 1980 terdapat 23 pasal yang mengatur tentang Peninjauan Kembali, sedangkan PERMA No. 1 Tahun 1969 hanya terdapat 8 pasal yang mengatur tentang Peninjauan Kembali. Salah satu perbedaan substansial yang paling terlihat adalah di dalam PERMA No. 1 Tahun 1980, alasan Peninjauan Kembali mengenai adanya kekhilafan atau kekeliruan

yang menyolok dihapus baik diperkara pidana maupun perkara perdata.

Pasal 10 pihak yang dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah Jaksa Agung, terpidana atau pihak yang berkepentingan. Pasal 16 menyatakan apabila terpidana telah meninggal dunia, permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh ahli waris atau Jaksa Agung. Berdasarkan pasal 10 dan 16 Jaksa memang diberi wewenang untuk dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Akan tetapi, keterangannya kurang jelas untuk alasan atau dasar yang mana Jaksa, utamanya Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Menurut pasal 9 ayat 1 b salah satu alasan atau dasar pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang hanya dimiliki oleh terpidana dan pihak yang berkepentingan. Jika dihubungkan dengan pasal 16 jelas terlihat bahwa Jaksa Agung memiliki hak juga untuk mengajukan permohonan peninjauan kembalu atas dasar novum, tetapi demi kepentingan terpidana itu sendiri.⁴²

PERMA No. 1 Tahun 1980 ini pun juga tidak bertahan lama, karena pada sejarahnya, setahun kemudian terbit Undang-undang No. 8 Tahun 1981 yang saat ini disebut KUHAP. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beberapa ketentuan yang sebelumnya terdapat pada PERMA No. 1 Tahun 1969 dan PERMA No. 1 Tahun 1980 tidak lagi digunakan. Salah satunya adalah

⁴² Ibid

kewenangan Jaksa Agung untuk mengajukan Peninjauan Kembali dan kewenangannya mewakili kepentingan terpidana sebagaimana diatur dalam pasal 16 PERMA No. 1 Tahun 1980. Hilangnya kewenangan Jaksa Agung untuk mengajukan Peninjauan Kembali juga terdapat dalam definisi upaya hukum dalam pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana butir 12. Pasal tersebut menyatakan upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Namun untuk Penuntut Umum hanya berupa perlawanan banding dan kasasi. Dan untuk permohonan Peninjauan Kembali hanyalah hak terpidana. Dari definisi yang terdapat pada butir 12 tersebut, untuk permohonan Peninjauan Kembali hanyalah hak dari terpidana untuk tidak menerima putusan, sedangkan hak Jaksa dalam hal ini penuntut umum hanyalah banding dan kasasi.

Setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Oktober 1997 terbit suatu peraturan dalam bidang peradilan militer, yakni Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam undang-undang tersebut, khususnya pasal 1 butir 41 memberikan hak kepada oditur untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lebih jelasnya bunyi pasal 1 butir 41 a menentukan oditur serta terdakwa/ terpidana berhak mengajukan upaya hukum biasa maupun luar biasa.

Dengan adanya pengaturan dalam pasal 1 butir 41 a tersebut memberikan kejelasan bahwa dalam peradilan pidana militer, Oditur militer memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Namun, permohonan itu sifatnya terbatas apabila dalam putusan itu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 248 ayat 3 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Hukum Acara Peradilan Militer.

E. Kajian Umum Tentang Penafsiran Hukum

Setiap undang-undang atau peraturan yang tertulis membutuhkan suatu penafsiran. Hal tersebut dikarenakan oleh undang-undang memiliki sifat yang statis dan sulit dirubah serta kaku. Kita ketahui bahwasannya undang-undang telah tertulis secara sistematis dan lengkap, namun dibalik itu semua pasti memiliki kekurangan salah satunya sulitnya penerapan, maka dari itu diperlukan adanya sebuah penafsiran. Menurut Soedjono Dirjosisworo penafsiran adalah sebuah kegiatan untuk menentukan arti atau makna dari sebuah teks ataupun bunyi pasal berdasar pada kaitannya.⁴³ Kemudian R. Soeroso mendefinisikan interpretasi atau penafsiran adalah mencari serta menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta dimaksud oleh pembuatan undang-undang.⁴⁴

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan tujuan dari dilakukannya penafsiran hukum adalah untuk menentukan arti yang sebenarnya

⁴³ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 156

⁴⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 97

dari undang-undang tersebut sesuai dengan kehendak dari pembuat undang-undang. Dalam penafsiran hukum, terdapat beberapa macam penafsiran, diantaranya adalah:⁴⁵

1. Penafsiran menurut tata bahasa (*Grammaticale interpretatie*) adalah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan tata bahasanya. Contohnya: “pegawai negeri menerima suap”, maka subjek disini adalah pegawai negeri.
2. Penafsiran secara sistematis, adalah penafsiran apabila terdapat satu istilah atau perkataan dicantumkan dua kali dalam satu pasal, atau undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula. Contohnya pada pasal 302 KUHP dicantumkan dua kali istilah binatang, maka kepada kedua istilah tersebut harus diberikan pengertian yang sama.
3. Penafsiran mempertentangkan (*argumentum acontrario*), yaitu menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah yang sedang dihadapi. Misalnya “tiada pidana tanpa kesalahan” adalah pidana hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang yang padanya terdapat kesalahan.
4. Penafsiran memperluas (*extensieve interpretatie*), yaitu memperluas pengertian dari suatu istilah berbeda dengan pengertiannya yang digunakan sehari-hari. Contohnya aliran listrik ditafsirkan sebagai benda.
5. Penafsiran mempersempit (*restrictieve interpretatie*) yaitu mempersempit pengertian dari suatu istilah. Contohnya kerugian ditafsirkan menjadi kerugian yang tidak termasuk kerugian tidak terwujud, seperti sakit, cacat dan sebagainya.

⁴⁵ Ishaq, *Dasar-dasar ilmu hukum*, Jakarta, 2012 Sinar Grafika. Hlm.255-256

6. Penafsiran historis (*rechts/ wets-historis*), adalah mempelajari sejarah yang berkaitan atau mempelajari pembuatan undang-undang yang bersangkutan maka akan ditemukan pengertian dari suatu istilah yang ingin dimengerti.
7. Penafsiran teleogis adalah mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan undang-undang.
8. Penafsiran logis yaitu mencari pengertian dari suatu istilah berdasarkan hal-hal yang masuk akal.
9. Penafsiran analogi adalah penafsiran yang memperluas cakupan atau pengertian dari undang-undang.
10. Penafsiran komparatif, yaitu membandingkan dengan penjelasan perbandingan hukum agar ditemukan kejelasan suatu ketentuan peraturan.
11. Penafsiran futuristis adalah penafsiran dengan penjelasan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum, yaitu rancangan undang-undang.

F. Kajian Umum tentang Putusan Pengadilan

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan dalam pengadilan tergantung hasil dari musyawarah majelis hakim. Musyawarah majelis hakim tersebut juga berkaitan dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan. Dari kemungkinan-kemungkinan hasil pembuktian, putusan yang akan dijatuhkan terdapat beberapa macam, diantaranya:

1. Putusan Bebas

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas yang berarti lepas dari segala tuntutan hukum atau tidak dipidana (*vrij sparaak*).⁴⁶ Kriteria untuk terdakwa dapat diputus bebas diatur dalam pasal 191 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. kriteria tersebut adalah tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-undang. Pembuktian dalam persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan kurang meyakinkan hakim.⁴⁷

2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum;

Kriteria dari putusan tersebut terdapat pada pasal 191 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. kriteria tersebut adalah apabila pengadilan berpendapat perbuatan yang didakwakan terbukti namun bukan sebuah tindak pidana.

3. Putusan Pemidanaan;

Hal ini terjadi apabila suatu tindak pidana yang didakwakan terbukti dan meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana.

Setelah putusan yang akan dikeluarkan telah diketahui, maka selanjutnya terdapat hal-hal yang wajib ada dalam putusan. Pasal 197 ayat

1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang ketentuan format dalam putusan. format tersebut diantaranya adalah:

a. Terdapat kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

⁴⁶ Andi Sofyan, Abd. Asis, Op.cit, hlm.345

⁴⁷ Ibid, 352

- b. Identitas lengkap terdakwa secara benar;
- c. Dakwaan sesuai dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta persidangan;
- e. Tuntutan sesuai dalam surat tuntutan;
- f. Waktu diadakannya musyawarah majelis hakim;
- g. Pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dalam menjatuhkan putusan;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa serta pemidanaan;
- i. Ketentuan kepada siapa pembebanan biaya perkara dijatuhkan;
- j. Keterangan kepalsuan apabila terdapat surat otentik yang dianggap palsu;
- k. Perintah penahanan terdakwa atau terdakwa tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari serta tanggal putusan, nama penuntut umum dan nama hakim yang memutus perkara.

Kesalahan dalam penulisan atau pengetikan selain pada ketentuan dalam huruf a, e, f dan h tidak menyebabkan putusan batal demi hukum. Dan apabila terdapat kesalahan pengetikan yang sangat fatal apabila sampai menyebabkan perubahan secara materiil putusan tersebut dapat dibatalkan.⁴⁸

G. Kajian Umum tentang Prinsip Universal Hak Atas Peradilan yang Adil

Dan Tidak Memihak (Fair Trial)

Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang terdapat di dalam Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Sipil dan Politik

⁴⁸ Penjelasan pasal 197 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

telah dapat ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHP telah dinyatakan kedua ketentuan tersebut dapat dijadikan sebagai alat ukur hukum acara.⁴⁹ Namun yang secara rinci menentukan atau menjabarkan alat-alat ukur suatu hukum acara terdapat pada Konvensi Hak Sipil dan Politik yang didalamnya terdapat pada pasal 9 sampai pada pasal 14, yang diantaranya:

1. Prosedur persamaan Kedudukan (*Equality of arms*), maksud dari persamaan kedudukan yakni, kedua belah pihak dalam persidangan harus diperlakukan sama pada setiap prosedur dalam pemeriksaan persidangan.
2. Persidangan Terbuka untuk Umum dilakukan secara lisan, dalam pasal 14 Konvensi Sipil dan Politik mengamanatkan bahwa setiap persidangan harus terbuka untuk umum. Hal ini ditujukan agar masyarakat dapat berpartisipasi untuk mengawasi jalannya persidangan. Namun terdapat beberapa persidangan yang sifatnya tertutup untuk umum seperti tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
3. Pengadilan yang kompeten, Independen serta tidak memihak, asas ini ditujukan agar persidangan terhindar dari kesewenang-wenangan atau bias potensial jika tuduhan pidana akan diputus oleh suatu badan politik atau satu perwakilan administratif.
4. Berdasar asas Legalitas;
5. Berdasar asas Praduga Tidak Bersalah;

⁴⁹ Abdul Hakim Garuda Nusantara et all, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Djambatan, 2002, Hlm. 222

6. Adanya jaminan Prosedur Minimal yakni seseorang yang tertuduh harus diberitahukan secara cepat dan detail tentang sifat serta alasan dari tuduhan tersebut.
7. Hak dari Fasilitas-Fasilitas serta waktu yang memadai untuk pembelaan;
8. Asas Perdilan Sederhana, cepat serta biaya ringan atau suatu peradilan tanpa penundaan yang tidak semestinya (*speedy trial*);
9. Hak untuk melakukan pembelaan;
10. Hak memperoleh suatu bantuan hukum;
11. Hak atas saksi dalam hal perlindungan saksi;
12. Hak atas memperoleh penerjemah/ Juru Bahasa;
13. Asas atas *non self-incrimination*, terdakwa diberikan hak untuk tidak memberikan keterangan yang malah akan memberatkan atau merugikan dirinya dalam persidangan.
14. Hak atas mendapatkan kompensasi, mendapat ganti rugi serta mendapat rehabilitasi;
15. Diterapkannya asas *Nebis In Idem*, maksudnya tidak memperkenankan seseorang untuk diadili untuk kesalahan yang sama dalam dua kali dimana dia telah dihukum atau dibebaskan atas perkara tersebut.
16. Hak mendapatkan perlakuan yang berperikemanusiaan.

Dari semua kriteria fair trial yang sudah disebutkan penulis diatas, terdapat kriteria yang penting dalam penelitian ini, yakni Prosedur dan Persamaan Kedudukan (*Equality of arms*). Kriteria ini menjelaskan bahwa kedudukan antara terdakwa dan penuntut umum adalah seimbang. Seimbang

di sini maksudnya adalah kedua belah pihak diperlakukan sama dan mendapatkan prosedur yang sama untuk menempuh suatu peradilan.⁵⁰

G. Tinjauan Umum Mengenai Teori Tujuan Hukum.

Dalam Fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum, mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.

Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan penyeimbangan.⁵¹ Dengan terciptanya suatu ketertiban dalam warga negara dengan tujuan untuk kepentingan manusia sehingga kedepannya akan dapat terlindungi.⁵² Demi tercapainya tujuan tersebut hukum mempunyai tugas dalam hal membagikan suatu hak dan kewajiban diantara perseorangan dalam warga negara, membagikan suatu kewenangan dan pengaturan suatu cara dalam pemecahan suatu masalah hukum dan juga memelihara suatu kepastian hukum.⁵³

Dalam literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum yakni sebagai berikut :

a. Teori *Etis*

Menurut teori *etis*, hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang *etis* tentang yang adil dan tidak. Dengan kata lain hukum menurut teori

⁵⁰ Siti Aminah, **Prinsip-Prinsip Hak Atas Peradilan Yang Adil Dan Tidak Memihak (Fair Trial)**, ILRC, Jakarta, 2011, hlm. 2-12

⁵¹ Siswo Wiratmo, **Pengantar Ilmu Hukum (PIH)**, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1990, Hlm. 21

⁵² Soeharto, Jonaedi Efendi, **Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana**, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2010, Hlm. 28

⁵³ Saut P. Panjaitan, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian dan Sistematika)**, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998, Hlm. 57

ini bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Geny termasuk salah seorang pendukung teori ini.⁵⁴

b. Teori *Utilitis (Eudaemonistis)*

Menurut teori ini, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*).⁵⁵ Pada hakikatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.⁵⁶

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.⁵⁷

Disamping tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Kemudian menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto, tujuan hukum adalah kedamaian hidup antarprabadi yang meliputi ketertiban ekstern antara pribadi dan ketenangan intren pribadi.⁵⁸ Mirip dengan pendapat Purnadi adalah pendapat Van Apeldoorn yang menagtakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.⁵⁹ Dalam mengabdikan kepada tujuan negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Tujuan

⁵⁴ Soeharto, Jonaedi Efendi, Op.cit. hlm. 57

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta, 1991, Hlm. 4

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, **Pengantar Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 2000, Hlm. 12

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Apeldon Van, **Inleiding Tot de Stude van Het Nederlands Recht**, Alih Bahasa Oetard Sadino, Pradya Paramita, Jakarta, 1990, Hlm. 6

hukum menurut hukum positif. Indonesia tercantum dalam alinea 4

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

c. Nilai Kepastian

Hans Kelsen mengatakan suatu nilai kepastian dapat diwujudkan dalam suatu hukum positif.⁶⁰ Hal ini berarti bahwa hukum adalah sesuatu yang independen. Independen di sini berarti harus lepas dari unsur-unsur non-yuridis, termasuk unsur etis, sosiologis politik dan juga lainnya.

Kemudian sistem hukum tersebut merupakan suatu hirarki dari hukum itu sendiri. Maksudnya ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lain yang lebih tinggi.



⁶⁰ Lili Rasjidi & Ira Thania Rajidi, **Pengantar Filsafat Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.

⁶⁰

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis normatif yang mencakup tentang sistematika suatu hukum. Penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang mana objeknya adalah ilmu hukum itu sendiri.⁶¹ Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁶² Selain asas, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, contohnya adalah doktrin iktikad baik, doktrin fakta dan sebagainya.⁶³

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif adalah karena pada penelitian ini terdapat isu hukum terkait hukum positif yang mengalami kekaburan norma. Dalam hal ini yang menjadi pokok pembahasan adalah urgensi dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali. Sebelum mengetahui urgensinya, penulis hendak mengetahui siapa saja pihak yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali. Karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali hanya terpidana dan ahli warisnya. Tetapi pada praktiknya Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan Peninjauan Kembali

⁶¹ Jhonny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011, Hal. 57

⁶² Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 24

⁶³ Ibid

melalui penafsiran-penafsiran yang memancing pendapat baik pendapat pro dan juga kontra.

B. Pendekatan Penelitian

Di dalam metode penelitian hukum normatif terdapat beberapa macam pendekatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan terhadap undang-undang/ peraturan yang berlaku (*statute approach*). Pendekatan Undang-Undang digunakan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁶⁴ Pendekatan terhadap undang-undang digunakan dalam hal meneliti dan menganalisis pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun undang-undang lain yang terkait dengan peraturan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Peraturan-peraturan tersebut akan dikaji secara horizontal dan vertikal dengan melihat sinkronisasi beberapa peraturan perundang-undangan.

C. Jenis Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk menerangkan suatu data dalam penulisan ini yakni dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan primer itu sendiri adalah bahan hukum yang bersifat utama dan sebagai dasar utama dalam penulisan penelitian ini.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang mengikat, antara lain:

1. Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93

2. Pasal 14 ayat 1 Konvensi Sipil dan Politik (*ICCPR*);
3. Pasal 4 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 1969;
4. Pasal 21 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
5. Pasal 244 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
6. Pasal 263 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
7. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1982 tentang Peninjauan Kembali;
8. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP;
9. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
10. Pasal 24 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
11. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
12. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1982 tentang Peninjauan Kembali;

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah semua bahan hukum yang didapat dari melakukan studi kepustakaan baik itu melalui internet, literatur buku, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal hukum maupun pendapat para ahli.

Penulisan ini juga menggunakan beberapa literatur buku, jurnal melalui internet yang terkait dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, contohnya seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.⁶⁵

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum primer dalam penulisan ini dilakukan dengan penelusuran studi pustaka terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Dan untuk memperoleh bahan hukum sekunder, penulis memperolehnya dari studi literatur di perpustakaan, mengunduh berbagai artikel dan jurnal di internet yang terkait dengan topik dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif dengan cara studi kepustakaan diuraikan dan dikorelasikan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara induktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkret yang bersifat khusus kepada permasalahan abstrak yang bersifat umum. Bahan-

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, Hal. 52

bahan hukum tersebut dikelompokkan, disusun secara sistematis, dianalisis dengan menggunakan interpretasi dengan urutan :

1. Bahan hukum primer yang telah didapat dianalisis lebih jauh dengan menggunakan kerangka teoritis yang terdapat di tinjauan pustaka.
2. Setelah dianalisis lebih mendalam, bahan hukum primer dianalisis melalui bagian penjelasan yang memberikan keterangan tambahan dalam bahan primer tersebut, serta dapat melalui undang-undang yang terkait dan literatur.
3. Proses analisis bahan hukum yang dapat digunakan yakni melihat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam hal pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali dalam tersebut dalam bahan hukum primer. Penelitian ini memiliki tahapan yang telah sesuai dengan penggunaan metode penelitian yuridis normatif dalam membahas suatu permasalahan hukum.

Selanjutnya bahan-bahan hukum yang ada dianalisis secara deksriptif yang diawali dengan mengelompokkan bahan hukum yang sama dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap tiap aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.

F. Definisi Konseptual

1. Urgensi adalah suatu suku kata yang berarti pentingnya atau suatu alasan yang mendasari sesuatu untuk dilakukan. Kemudian hal tersebut menjadi suatu latar belakang dari suatu pengambilan tindakan.
2. Peninjauan Kembali dalam hukum acara pidana adalah suatu upaya hukum luar biasa yang diajukan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Upaya hukum peninjauan kembali dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses peradilan. Setiap pihak mendapatkan hak yang sama untuk dapat mengajukan peninjauan kembali namun harus memenuhi syarat atau alasan-alasan dasar peninjauan kembali yang telah ditetapkan oleh pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Jaksa Penuntut Umum adalah seorang jaksa yang diberi wewenang untuk dapat menjadi penuntut umum dalam persidangan perkara pidana. Selain bertugas sebagai penuntut umum, Jaksa penuntut umum merupakan wakil dari negara atau masyarakat dan juga bisa menjadi wakil dari korban atas reaksinya mengenai terjadinya suatu tindak pidana.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pihak Yang Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali/ *Herziening* saat ini diatur di dalam pasal 263 samapai dengan Pasak 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal 263 ayat 1 ketentuan untuk pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Sebelum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dibentuk terdapat peraturan-peraturan yang sudah mengatur tentang Peninjauan Kembali.

Pada mulanya Peninjauan Kembali diatur dalam pasal 15 Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut hanya mengatur Upaya Peninjauan Kembali adalah upaya yang dapat ditempuh terhadap putusan *inkracht* apabila terdapat hal atau keadaan yang ditentukan oleh undang-undang. Namun dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara jelas terkait teknis serta pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali.

Di tahun 1969 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 1969. Dalam pasal tersebut terdapat 8 pasal yang mana mengatur khusus tentang Peninjauan Kembali. Untuk perkara pidana terdapat 2 pasal yang mengaturnya yakni pasal 3 dan 4. Pasal 3 mengatur tentang dasar alasan permohonan Peninjauan Kembali. Pasal 4 mengatur tentang para pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali. Pihak tersebut antara lain adalah

terpidana atau pihak yang berkepentingan atau Jaksa Agung. Dalam

PERMA No. 1 Tahun 1969 secara eksplisit memberikan hak kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali.

Tidak lama setelah terbitnya PERMA No. 1 Tahun 1969, PERMA tersebut ditunda pelaksanaannya dengan SEMA No. 18 Tahun 1969. Tahun 1970 Undang-undang No. 19 Tahun 1964 diperbaharui dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 mengatur pihak-pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali. Undang-undang ini tidak mengizinkan Jaksa untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

Jadi pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali dalam Undang-undang ini hanyalah terpidana dan ahli warisnya.

Terbitnya Undang-undang No. 19 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman melatar belakangi Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 1971. PERMA tersebut diterbitkan untuk membatalkan SEMA No. 18 Tahun 1969. Alasan Mahkamah Agung untuk melakukan pembatalan tersebut, dikarenakan pada masa itu sedang dibahas suatu rancangan undang-undang yang akan mengatur hukum acara termasuk Peninjauan Kembali. Mahkamah Agung beranggapan bahwa sebaiknya pelaksanaan pemeriksaan Peninjauan Kembali menunggu terbitnya undang-undang yang sedang dibahas rancangannya. Tetapi hingga tahun 1976 rancangan undang-undang yang dimaksud tidak kunjung terbit dan hal tersebut menggerakkan Mahkamah Agung untuk mencabut PERMA No. 1 Tahun 1971 dan PERMA No. 18 Tahun 1969 kembali berlaku melalui PERMA No. 1 Tahun 1976.

Hingga tahun 1980 undang-undang yang mengatur tentang hukum acara pemeriksaan Peninjauan Kembali belum juga diterbitkan. Setelah melakukan rapat dengan DPR, Mahkamah Agung akhirnya diterbitkan PERMA No. 1 Tahun 1980 dengan terdapat 8 pasal yang mengatur Peninjauan Kembali. Dalam pasal 10 PERMA No. 1 Tahun 1980 memberikan ketentuan tentang pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali. Dan PERMA ini mengembalikan hak Jaksa Agung untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Pasal 16 menyatakan apabila terpidana telah meninggal dunia, permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh ahli waris atau Jaksa Agung. Berdasarkan pasal 10 dan 16 Jaksa memang diberi wewenang untuk dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Akan tetapi, keterangannya kurang jelas untuk alasan atau dasar yang mana Jaksa, utamanya Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Menurut pasal 9 ayat 1 b salah satu alasan atau dasar pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang hanya dimiliki oleh terpidana dan pihak yang berkepentingan. Jika dihubungkan dengan pasal 16 jelas terlihat bahwa Jaksa Agung memiliki hak juga untuk mengajukan permohonan peninjauan kembalu atas dasar *novum*, tetapi demi kepentingan terpidana itu sendiri.

Dari beberapa kali perubahan pengaturan tentang Peninjauan Kembali yang telah dijelaskan diatas, penulis berkesimpulan bahwa Jaksa yang dalam hal ini Jaksa Agung diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Hal tersebut selama masih dalam koridor kepntingan terpidana sendiri, atau sebagaimana dikarenakan alasan yang diatur dalam pasal 9 ayat 2, yang memang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung.

PERMA No. 1 Tahun 1980 ini pun juga tidak bertahan lama, karena pada sejarahnya, setahun kemudian terbit Undang-undang No. 8 Tahun 1981 yang saat ini disebut KUHP. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beberapa ketentuan yang sebelumnya terdapat pada PERMA No. 1 Tahun 1969 dan PERMA No. 1 Tahun 1980 tidak lagi digunakan. Salah satunya adalah kewenangan Jaksa Agung untuk mengajukan Peninjauan Kembali dan kewenangannya mewakili kepentingan terpidana sebagaimana diatur dalam pasal 16 PERMA No. 1 Tahun 1980. Hilangnya kewenangan Jaksa Agung untuk mengajukan Peninjauan Kembali juga terdapat dalam definisi upaya hukum dalam pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana butir 12. Pasal tersebut menyatakan upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Namun untuk Penuntut Umum hanya berupa perlawanan banding dan kasasi. Dan untuk permohonan Peninjauan Kembali hanyalah hak terpidana. Dari definisi yang terdapat pada butir 12 tersebut, untuk permohonan Peninjauan Kembali hanyalah hak dari terpidana untuk tidak menerima putusan, sedangkan hak Jaksa dalam hal ini penuntut umum hanyalah banding dan kasasi.

Setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Oktober 1997 terbit suatu peraturan dalam bidang peradilan militer, yakni Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam undang-undang tersebut, khususnya pasal 1 butir 41 memberikan hak kepada oditur untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lebih jelasnya bunyi pasal 1

butir 41 a menentukan oditur serta terdakwa/ terpidana berhak mengajukan upaya hukum biasa maupun luar biasa.

Adanya pengaturan dalam pasal 1 butir 41 a tersebut memberikan kejelasan bahwa dalam peradilan pidana militer, Oditur militer memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Namun, permohonan itu sifatnya terbatas apabila dalam putusan itu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 248 ayat 3 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Hukum Acara Peradilan Militer.

Pengaturan Peninjauan Kembali dalam Undang-undang No. 31 tahun 1997 seakan menjadi penghubung antara rumusan Peninjauan Kembali dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam pasal 263 sampai pasal 268 dengan PERMA-PERMA sebelumnya yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Jaksa khususnya Jaksa Agung untuk mengajukan Peninjauan Kembali.

Pada tataran prakteknya, meskipun tertulis secara eksplisit bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah terpidana dan ahli warisnya, Jaksa Penuntut Umum tetap dapat mengajukan Peninjauan Kembali. Hal tersebut dibuktikan pada beberapa kasus yang terjadi. Kasus-kasus tersebut antara lain :

Tabel 2

**Putusan Peninjauan Kembali Yang Permohonannya Diajukan Oleh
Jaksa Penuntut Umum**

No	Nomor Putusan	Terpidana	Tindak Pidana
1	No. 55 PK/ Pid/ 1996	Muchtar Pakpahan	Penghasutan
2	No. 03 PK/ Pid/ 2001	Ram Gulumal	Pemalsuan Akta Gandhi Memorial School
3	No. 15 PK/ Pid/ 2006	Soetiyawati	Perusakan barang
4	No. 84 PK/ Pid/ 2006	Mulyar Bin Sjamsi	Tindak Pidana Kehutanan
5	No. 109 PK/ Pid/ 2007	Pollycarpus	Pembunuhan alm. Munir
6	No. 07 PK/ Pidsus/ 2009	Sjahril Sabirin	Korupsi
7	No. 12 PK/ Pidsus/ 2009	Joko S Tjandra	Korupsi
8	No. 16 PK/ Pid/ 2010	Zaki Toya Bawazier	Penipuan/ Penggelapan
9	No. 41 PK/ Pid/ 2009	Nyayu Saodah	Memberikan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik

Sumber : mahkamahagung.go.id

Sembilan kasus diatas semuanya telah diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut berarti sudah terbukti bahwa memang Jaksa Penuntut Umum memiliki hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali.

Pada kasus Muchtar Pakpahan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali dengan dasar alasan ditemukannya *novum*. Hak jaksa/kejaksaan dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali adalah dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum yang mewakili negara dan kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian permintaan peninjauan kembali ini bukan karena kepentingan pribadi jaksa atau lembaga kejaksaan, tetapi untuk kepentingan umum/negara. Apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, antara lain terdapat dalam penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kasus Ram Gulumal Alasan jaksa mengajukan peninjauan kembali dalam kasus terpidana Ram Gulumal alias V. Ram dengan kasus The Gandhi Memorial School sebagaimana termuat dalam putusan peninjauan kembali Nomor : 3 PK/Pid/2001 tanggal 2 Agustus 2001, Adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tentang jati diri terdakwa Ram Gulumal alias V. Ram, Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tentang amar putusan, yaitu dengan amar "Mengadili sendiri, menyatakan permohonan banding terdakwa terhadap dakwaan kedua tidak dapat diterima". Padahal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap dakwaan kedua adalah putusan bebas, dan terdakwa Ram Gulumal alias V. Ram tidak pernah mengajukan permohonan banding terhadap putusan dakwaan kedua tersebut. Akan tetapi, ternyata

walaupun terdakwa Ram Gulumal alias V. Ram tidak pernah mengajukan banding terhadap putusan dakwaan kedua, Mahkamah Agung telah mengadili sendiri dan menyatakan permohonan banding terdakwa terhadap putusan dakwaan kedua tidak dapat diterima. Tindakan mengadili sendiri permohonan banding yang tidak ada memperlihatkan secara jelas kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, sehingga putusan Mahkamah Agung Nomor 2 K/Pid/1995 tanggal 8 Juni 1995 harus dibatalkan.

Pada kasus Soetiyawati, alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali karena adanya 2 *novum* serta terdapat kekhilafan hakim yang nyata. Putusan *judex juris* mengandung unsur kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, yaitu dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah atau terhapus unsur melawan hukumnya. Oleh karena itu, bukanlah merupakan perbuatan pidana. Dalam amar putusannya Majelis Hakim Kasasi malah membebaskan/melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, seharusnya putusan bersifat pemidanaan. Sehingga berdasarkan Pasal 263 ayat (3) KUHAP, hal tersebut menjadi salah satu alasan bagi jaksa mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Pada kasus Pollycarpus, Alasan jaksa mengajukan peninjauan kembali dalam kasus terpidana

Pollycarpus Budihari Priyanto sebagaimana termuat dalam putusan peninjauan kembali Nomor : 109 PK/Pid/2007 tanggal 25 Januari 2008, adalah Ditemukannya keadaan baru (*Novum*) berdasarkan hasil penyidikan terhadap perkara atas nama Indra Setiawan dan Rochanil Aini berupa

keterangan saksi, terdakwa dan ahli. Kemudian putusan akhir dari kasus ini adalah Polycarpus dipidana yang mana sebelumnya pada peninjauan kembali juga Polycarpus diputus bebas.

B. Jaksa Penuntut Umum Memiliki Hak Yang Sama Dengan Terpidana (Tersangka/ Terdakwa) Dalam Hukum Acara Pidana

1. Posisi Yang Setara Karena Adanya Kontrak Sosial

Lembaga peradilan merupakan salah satu fasilitas negara untuk memberikan pelayanan publik dalam bidang hukum. Dan lembaga peradilan tersebut termasuk suatu wilayah kekuasaan kehakiman. Begitu pula Kejaksaan yang termaktub pada konsideran huruf b Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Kejaksaan termasuk salah satu badan dalam wilayah kekuasaan kehakiman. Pada awalnya pelayanan publik terbetuk dari aktivitas politik yang terbentuk dari adanya negara serta waganya. Negara terbentuk karena adanya kesepakatan antara sekelompok individu yang besar dan memiliki hubungan sosial dengan kelompok individu yang lebih kecil untuk membentuk ketertiban.⁶⁶ Ketertiban tersebut dimaksudkan dapat mengakomodir kepentingan mereka.⁶⁷ Kesepakatan itu kemudian disebut dengan kontrak sosial. Pada kondisi nyatanya, hal itu terwujud dengan masyarakat memberikan mandat kepada negara untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat melalui fasilitas negara berupa pemerintahan.⁶⁸

⁶⁶ C.S.T. Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 133.

⁶⁷ John Locke, *An Essay Concerning the True Original, Extent and End of Civil Government*, Oxford University Press, London, 1960, hlm. 84

⁶⁸ Ibid.

Sebagai aparaturnegara, Jaksa Penuntut Umum mempunyai posisi yang sangat penting karena memegang wewenang tertinggi pada proses penuntutan. Jaksa Penuntut Umum bertindak untuk dan atas nama masyarakat yang merupakan korban secara tidak langsung dari suatu tindak pidana sekaligus wakil dari korban langsung serta bertindak untuk memperjuangkan keadilan karena jabatannya yang diberi oleh negara sebagai penegak hukum. Tanggung jawab yang cukup besar tersebut datang karena adanya kontrak sosial yakni negara harus menangani dengan baik masalah yang terjadi dalam masyarakat. Maksud dari kontrak sosial dalam hal ini adalah negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi.⁶⁹ Dari definisi diatas, ketika terjadi kejahatan serta melawan korban ataupun masyarakat, negara harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban dan masyarakat. Bentuk wujud pemberian tanggungjawab kepada Jaksa dari kontrak sosial tersebut terdapat pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁷⁰ Pasal tersebut menerangkan bahwa Jaksa penuntut umum merupakan figur negara dalam wilayah kekuasaan penuntutan serta dalam hal ini negara menjadi wakil dari masyarakat karena adanya kontrak sosial. argumentasi sosialnya menyatakan bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam

⁶⁹ Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan**, Mandar Maju, Jakarta, 2010, hlm. 151

⁷⁰ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Berbunyi "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasar undang-undang"

memenuhi kebutuhannya atau mengalami kesulitan, melalui kerja sama dalam bermasyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara.⁷¹

Karena adanya hubungan tersebut dengan jabatannya sebagai Penuntut Umum, Jaksa adalah wakil dari masyarakat, korban serta negara adalah salah satu unsur dalam sistem peradilan pidana yang mana sistem tersebut dijalankan untuk mencapai tujuan dari Hukum Acara Pidana.

Keterkaitan tersebut merupakan hasil dari pendekatan dalam sistem peradilan pidana yakni pendekatan sosial. Pendekatan sosial melihat keempat aparaturnya penegak hukum adalah bagian dari sistem sosial. Oleh karena itu, masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab dalam sistem peradilan pidana.⁷² Untuk kepentingan masyarakat tersebut dalam hal ini diwakilkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang mengadili tindak pidana setara dengan posisi terdakwa.

2. Hak Yang Sama Berdasarkan Asas Dalam Hukum Acara Pidana

Yakni Asas *Equality Before The Law* dan Asas *Equaity Of Arms*

Hukum acara pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur tentang tata cara dalam menjalankan proses menemukan kebenaran dan keadilan apabila terjadi tindak pidana.⁷³ Untuk menemukan kebenaran

⁷¹ Lilik Mulyadi, Op.cit. hlm. 151

⁷² Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm.7

⁷³ Andi Sofyan, Abd. Asis, Opcit, hlm.

tersebut, terdapat beberapa tahapan dalam prosesnya. Demi melindungi hak-hak para pihak dalam prosesnya hukum acara pidana memiliki beberapa asas yang wajib diterapkan.⁷⁴ Salah satunya adalah prinsip *equality before the law*.

Pada pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apabila dikorelasikan dengan asas yang berada dalam hukum acara pidana kurangnya sesuai khususnya asas *equality before the law* atau asas persamaan di depan hukum.⁷⁵ Dalam asas ini, sesuai yang tertuliskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa setiap orang diperlakukan sama dengan tidak memihak, tidak membedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin dan lain-lainnya di muka hukum atau pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.⁷⁶ Kemudian selain asas *equality before the law*, pasal tersebut juga tidak sesuai dengan asas universal dalam standar internasional peradilan pidana yakni asas Prosedur dan Persamaan Kedudukan.⁷⁷ Menurut Pasal 14 ayat 1 Konvensi Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, maksud dari Prosedur dan persamaan kedudukan atau *equality of arms* adalah antara pihak tersangka/ terdakwa dan Penuntut Umum harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang dikatakan dalam asas *equality before the law*. Persamaan kekuasaan yang mesti ditaati pada

⁷⁴ Ibid. Hlm. 14

⁷⁵ Butir 3 a Penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁷⁶ Andi Sofyan, Abd. Asis, Opcit, Hlm. 14

⁷⁷ Siti Aminah, *Prinsip-Prinsip Hak Atas Peradilan Yang Adil Dan Tidak Memihak (Fair Trial)*, ILRC, Jakarta, 2011, Hlm. 3

seluruh tingkat persidangan berarti bahwa kedua belah pihak diperlakukan dalam suatu keadaan yang menjamin posisi mereka yang secara prosedur selama jalannya suatu peradilan.⁷⁸ Persamaan prosedural tersebut kemudian dijabarkan sebagai berikut:⁷⁹

1. Penuntut umum dan terdakwa harus diberikan waktu yang sama untuk mempresentasikan bukti-bukti,
2. Saksi-saksi penuntut umum dan saksi-saksi terdakwa harus diberikan perlakuan yang sama dalam setiap prosedur acara,
3. Bukti yang didapatkan secara ilegal dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi manusia yang dilindungi secara internasional dan tidak dapat digunakan sebagai bukti yang memberatkan terdakwa atau orang lain dalam setiap proses pemeriksaan di depan sidang.

Dari penjabaran kedua asas tersebut yang terkandung dalam *Universal Principles* standar internasional⁸⁰ dan asas dalam hukum acara pidana menjadi salah satu alat tolak ukur apakah peradilan tersebut telah adil dalam mengadili suatu perkara. Kedua asas tersebut pada intinya menyatakan bahwa dalam segala proses peradilan para pihak wajib diberi kesempatan yang sama. Kesimpulannya, Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan pada salah

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ *Universal Principles* standar internasional adalah salah satu tolak ukur untuk menilai suatu peradilan itu telah adil atau tidak dalam mengadili suatu kasus. Standar tolak ukur tersebut merupakan kewajiban yang mengikat karena terdapat dalam pasal traktat-traktat internasional, dan negara yang telah menjadi pihak wajib menerapkannya. *Universal Principles* terdapat dalam Konvensi Sipil Politik, khususnya pasal 9 sampai dengan 14.

satu asas dalam *Fair Trial* atau peradilan yang jujur dan tidak memihak yakni *equality of arms* dan asas dalam hukum acara pidana yakni *equality before the law*. Argumentasi dari hal tersebut adalah, bahwa kedua asas tersebut menghimbau bahkan mewajibkan proses peradilan untuk tidak memihak dan memberikan perlakuan serta kesempatan yang sama dalam setiap prosedur dalam persidangan. Atas dasar asas *equity of arms* dan *equality before the law* inilah Jaksa dan Terpidan atau ahli warisnya dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Dan Upaya tersebut dilakukan Jaksa Penuntut Umum untuk mewujudkan tujuan dari hukum acara pidana yakni mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenar-benarnya untuk mencapai keadilan.

Mengacu pada peraturan terdahulu yang mengatur masalah Peninjauan Kembali yakni pasal 4 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 1969 menjelaskan bahwa pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah pihak yang berkepentingan atau Jaksa Agung. Jika ditelaah menurut pihak-pihak yang berada dalam persidangan adalah Jaksa dan Terpidana/ terdakwa. Maka dengan demikian, pasal tersebut telah memberikan hak yang sama kepada kedua belah pihak serta telah memenuhi asas dalam hukum acara pidana seperti yang telah disebutkan oleh penulis. Akan tetapi pasal tersebut tidak digunakan menjadi dasar pertimbangan dalam menerima permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada Kasus Peninjauan Kembali atas putusan bebas kasus Pollycarpus Budihari Priyanto dasar pertimbangan yang digunakan adalah menafsirkan pasal 21 Undang-undang No. 14 Tahun

1970.⁸¹ Dalam pasal 21 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 mengatakan Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal tersebut ditafsirkan bahwa di dalam perkara pidana selalu terdapat dua pihak yang berkepentingan yakni terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang mana dalam hal ini mewakili kepentingan umum (masyarakat dan negara). Oleh karena itu pihak yang berkepentingan tersebut ditafsirkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Juga pihak yang berhak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

C. Memperbaiki Putusan Yang Keliru Serta Mencari Kebenaran Materiil Sesuai Dengan Tujuan Hukum Acara Pidana

Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah hasil dari pengadilan atau dengan kata lain putusan dapat berarti pernyataan hakim di dalam persidangan yang berisi pertimbangan hukum berdasarkan kenyataan.⁸² Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak dan dalam putusan tersebut terdapat unsur-unsur yang penting antara lain:⁸³

1. Putusan diucapkan oleh pejabat negara yang diberi kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan;

⁸¹ Putusan Mahkamah Agung No. 109 PK/ Pid/ 2007

⁸² Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2011, Hlm. 108

⁸³ Ibid.

2. Putusan diucapkan dalam persidangan perkara yang terbuka untuk umum;
3. Putusan yang dijatuhkan sudah melalui proses dan prosedural hukum;
4. Putusan yang dibuat dalam bentuk yang tertulis;
5. Putusan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.

Putusan hakim sangat penting keabsahannya untuk mewujudkan adanya suatu kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan karena eksistensinya merupakan suatu dasar untuk mengadili dan menjatuhkan pidana yang dengan kata lain suatu putusan juga menimbulkan suatu akibat hukum. Putusan yang dalam hal ini putusan pidana yang dijatuhkan oleh negara adalah sah selama penerapannya sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum.

Kembali pada hukum acara pidana, para pihak yang berkepentingan dalam persidangan memiliki hak untuk tidak menerima suatu putusan, hak tersebut berupa suatu upaya hukum. Dalam upaya hukum Peninjauan Kembali, putusan hakim merupakan suatu syarat, khususnya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk mengajukan suatu upaya hukum, hal tersebut tentunya dikarenakan terdapat kekeliruan dalam putusan. Kekeliruan dalam putusan bisa terjadi dalam bentuk formil dan materiil.

Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan ketentuan tentang format isi yang ada dalam suatu putusan. Isi dari putusan tersebut diantaranya adalah:

- a. Terdapat kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Identitas lengkap terdakwa secara benar;
- c. Dakwaan sesuai dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta persidangan;
- e. Tuntutan sesuai dalam surat tuntutan;
- f. Waktu diadakannya musyawarah majelis hakim;
- g. Pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dalam menjatuhkan putusan;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa serta pemidanaan;
- i. Ketentuan kepada siapa pembebanan biaya perkara dijatuhkan;
- j. Keterangan kepalsuan apabila terdapat surat otentik yang dianggap palsu;
- k. Perintah penahanan terdakwa atau terdakwa tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari serta tanggal putusan, nama penuntut umum dan nama hakim yang memutus perkara.

Apabila ketentuan-ketentuan diatas tidak dipenuhi atau terdapat kesalahan dalam ketentuan diatas maka hal tersebut adalah kekeliruan putusan secara formil. Akibat dari kesalahan formil tersebut adalah putusan batal demi hukum. Namun apabila terdapat kesalahan dalam penulisan yang sampai dapat merubah esensi materiil, putusan tersebut dapat dibatalkan.⁸⁴

Kemudian untuk kekeliruan dalam putusan secara materiil adalah apabila dalam memutus suatu perkara tersebut, hakim telah keliru

⁸⁴ Yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 372

menerapkan suatu pasal atau telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum. Dan pertimbangan hukum tersebut pada dasarnya berhubungan dengan fakta-fakta atau keadaan di dalam persidangan. Pada bentuk putusan seperti inilah yang dapat menjadi dimintakan Peninjauan Kembali. Tentunya untuk mengajukan Peninjauan Kembali tersebut juga disertai oleh alasan yang terdapat pada pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Seperti yang telah dijelaskan penulis, bahwa suatu putusan harus mengandung suatu nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, namun dalam prakteknya tujuan hukum yang paling diutamakan adalah keadilan. Hal tersebut dipengaruhi oleh ajaran prioritas baku oleh Gustav Radbruch di mana dalam ajaran tersebut mengatakan keadilan harus selalu diprioritaskan.⁸⁵ Maka dari itu dalam suatu putusan hakim haruslah memberikan suatu keadilan yang dapat dirasakan oleh para pihak dalam persidangan. Namun apabila suatu putusan dimintakan suatu upaya hukum, maka hal tersebut membuktikan bahwa suatu keadilan belum dirasakan oleh pihak yang berkepentingan.

Upaya hukum Peninjauan Kembali disediakan oleh hukum acara pidana memang menyalahi suatu tujuan hukum yakni kepastian hukum akan tetapi hal itu dikarenakan seluruh aparatur dalam hukum acara pidana adalah manusia khususnya Hakim yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan juga memiliki kekhilafan. Maka Peninjauan Kembali

⁸⁵ Marcus Priyo Gunarto, **Mengembalikan Peninjauan Kembali**, Mimbar Hukum Volume 21 Volume 3, Fakultas Hukum UGM, 2009, Hlm. 471

merupakan upaya untuk menanggulangi kekhilafan dalam putusan yang terjadi tersebut. Putusan pengadilan atau putusan hakim haruslah dapat dirasakan adil bagi seluruh pihak, karena dampak dari putusan tersebut tidak hanya berguna pada nasib terpidana melainkan juga kepada masyarakat secara luas dan juga aparatur negara. Aparatur negara dalam hal ini terkena dampak karena suatu putusan hakim dapat menjadi yurisprudensi yang mana hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara serupa pada masa mendatang. Dapat disimpulkan bahwa Peninjauan Kembali merupakan sarana yang diberikan oleh negara melalui undang-undang untuk mencapai putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan dalam persidangan dalam hal ini adalah Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum. Pada pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang telah menentukan pihak serta putusan seperti apa yang dapat dimintakan Peninjauan Kembali.

Jenis putusan yang dapat dimintakan Peninjauan Kembali hanyalah putusan yang memberikan pidana, tidak terhadap putusan bebas. Dalam perkembangannya terdapat kasus Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas. Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas tersebut diterima oleh Mahkamah Agung meskipun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah ditetapkan hanya putusan yang mempidana saja yang dapat dimintakan Peninjauan Kembali. Tentunya untuk menerima permohonan tersebut terdapat beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama berdasarkan pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan

bahwa yang berhak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Kemudian jika kita melihat ke pasal 263 ayat 3

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam putusannya perbuatan yang didakwakan telah terbukti tetapi tidak dipidana dapat diajukan Peninjauan Kembali.

Dari ketentuan pasal diatas, apabila hanya pihak terpidana saja yang dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali maka akan merugikan pihak terpidana sendiri apabila terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada putusan yang seperti di sebutkan diatas. Karena kemungkinan yang akan dikeluarkan putusan yang didalamnya diikuti dengan suatu pemidanaan. Maka dari itu masih terdapat kemungkinan pihak lain selain pihak terdakwa atau ahli warisnya untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan pihak lain itu adalah Jaksa dalam hal ini adalah Penuntut Umum. Karena dalam pasalnya tertulis “perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan”.⁸⁶ Lebih jelasnya lagi, dalam putusan tersebut terdakwa sudah terbukti bersalah namun tidak dijatuhi hukuman/ putusan yang mempidana terdakwa. Suatu putusan yang berisi telah terbukti bersalah tetapi tidak diikuti pemidanaan adalah contoh dari kekeliruan. Karena itu jika hal seperti ini terjadi sangat dimungkinkan untuk Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan yang menyatakan terdakwa bersalah namun tidak dijatuhi hukuman.

⁸⁶ HMA Kuffal, **Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum**, UMM Press, Malang, 2007, hlm.233

Kedua, dalam pasal Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa segala macam putusan dari pengadilan tingkat terakhir kecuali dari Mahkamah Agung dapat dimintakan pemeriksaan kasasi kecuali putusan bebas.⁸⁷ Namun tahun 1983 Menteri Kehakiman mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP.⁸⁸ Keputusan Menteri tersebut berisikan tentang praktek dari *Ius Contra Legem*⁸⁹ pada Kasasi. Kasasi sendiri diatur dalam pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keputusan Menteri Kehakiman tersebut membuat suatu pedoman antara lain:⁹⁰

1. Terhadap putusan bebas maka tidak dapat dimintakan banding;
2. Namun apabila berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan, dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi;
3. Hal ini akan dijadikan sebagai yurisprudensi.⁹¹

Tidak lama setelah terbitnya Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi atas putusan bebas yakni pada putusan MA No. Reg. No. 275/K/ Pid/ 1983, dan putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi yurisprudensi yang menjadi

⁸⁷ Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi "Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas"

⁸⁸ Gunarto, **Mengembalikan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Sesuai Asas Hukum**, Mimbar Hukum, Volume 3, Fakultas Hukum UGM, 2009, Hlm. 9

⁸⁹ *Ius Contra Legem* adalah tindakan hakim yang mengesampingkan ketentuan undang-undang karena tidak sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan di masyarakat untuk memutus suatu perkara.

⁹⁰ Gunarto, Opcit, Hlm. 4

⁹¹ Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03

preseden pelaksanaan *ius contra legem*.⁹² Ketentuan upaya hukum kasasi dan Peninjauan Kembali memiliki persamaan dalam menentukan kriteria putusan yang dapat diperiksa. Kriteria itu adalah semua putusan kecuali putusan bebas. Putusan bebas sendiri, menurut pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan MA. No. Reg. No. 275/ K/ Pid/ 1983 membedakan putusan bebas menjadi dua jenis. Macam putusan bebas itu yakni putusan bebas murni dan tidak. Maka, Mahkamah Agung hanya menerima Kasasi atas putusan bebas tidak murni atau *verkapte vrijspraak*. Menurut Mahkamah Agung indikator putusan bebas tidak murni tersebut adalah.⁹³

1. Jika putusan bebas itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana;
2. Dalam menjatuhkan putusan, pengadilan melampaui kompetensi absolut maupun relatif;
3. Memberi pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Motivasi dari dilakukannya *ius contra legem* tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengoreksi dan meluruskan putusan bebas atau kekeliruan yang terkandung dalam putusan. Melihat hal yang terjadi pada pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, hal tersebut menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yakni dengan menafsirkan pasal 263 ayat 1 dengan penafsiran ekstensif serta analogi terhadap ketentuan pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana.

⁹² Ibid.

⁹³ Yahya Harahap, Opcit. 372

Penjelasan penafsiran ekstensif yang dilakukan adalah dengan memperluas arti putusan bebas. Kata putusan bebas tersebut terdapat dalam pasal 244 dan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Putusan bebas tersebut dipecah menjadi dua yakni putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni.

Apabila penafsiran analogi dilakukan dengan pengambilan tindakan hakim menyesuaikan dengan bagaimana hakim sebelumnya menerima permohonan kasasi pada putusan bebas. Pasal 244 sesungguhnya menentukan bahwa putusan bebas tidak dapat di kasasi. Hal tersebut terjadi pada suatu kasus dengan putusan MA. No. Reg. No. 275/ K/ Pid/ 1983. Putusan tersebut adalah putusan kasasi atas nama Raden Sonson Natalegawa sebagai terdakwa. Maka hal tersebut menjadi pertimbangan untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas. Penafsiran tersebut dilakukan untuk mengejar tercapainya kebenaran dan keadilan yang lebih maksimal maka, Penuntut Umum harus diberikan hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas.

Ketiga, pada dasarnya hakim memang tidak berhak berbuat *contra legem*. Hal tersebut diperbolehkan dengan alasan apabila dalam suatu perkara tidak jelas. Maka hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁹⁴ Tindakan hakim tersebut juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni pasal 16 ayat 1 dan pasal 28 (1)

⁹⁴ Luh Gede Siska Dewi Gelgel, **Pelaksanaan *Contra Legem* Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif**, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2013, hlm. 2

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim memang tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya atau kurang jelas hukumnya.⁹⁵ Ketentuan dalam pasal tersebut mengisyaratkan pada hakim untuk bertindak dengan inisiatif sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut apabila terjadi suatu perkara yang mana dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas mengaturnya dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat agar mencapai rasa keadilan masyarakat.⁹⁶

Selanjutnya pasal tersebut juga diperkuat dengan penjelasan bagian umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Bahwa undang-undang dasar ialah dasar yang tertulis, sedang disampingnya undang-undang dasar berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis”.⁹⁷ Berdasarkan peraturan yang telah disebutkan penulis diatas, hal tersebut membuat hakim tidak dapat bersifat legistik. Legalistik adalah hanya menjadi corong atau mulut undang-undang. Maka Hakim harus dapat memberikan perbaikan dalam masyarakat melalui putusannya, karena hanya dengan cara itu putusan hakim akan benar dan adil.⁹⁸ Ketika undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, menurut Yahya Harahap, hakim dapat melakukan tindakan *contra legem*. *Contra legem* adalah mengambil keputusan yang

⁹⁵ Lihat Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁹⁶ Penjelasan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

⁹⁷ Bagir Manan, **Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004**, Mahkamah Agung R.I, Jakarta, 2005, Hlm. 212

⁹⁸ Ibid

bertentangan dengan undang-undang yang bersangkutan.⁹⁹ Pelaksanaan *contra legem* dalam memutus perkara yang belum ada pengaturannya atau kurang jelas aturannya merupakan salah satu wujud pelaksanaan hukum progresif. Hukum progresif memerlukan upaya-upaya yang mana upaya tersebut memberikan suatu kemanfaatan dan keadilan. Hukum Progresif menganggap kepastian hukum tidak selalu memberikan keadilan. Sesuatu yang dicari dari aturan hukum adalah keadilan dan kemanfaatan, apabila hal tersebut telah terealisasi maka tidak akan terjadi persoalan hukum.¹⁰⁰

Oleh karena itu Hakim Agung Mahkamah Agung dapat menerima beberapa permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum.

Keempat, dasar pertimbangan tersebut dapat didasarkan pada pendapat para ahli hukum. Yahya Harahap berpendapat bahwa hukum acara pidana termasuk hukum publik dan dimungkinkan untuk melakukan penafsiran atau diskresi apabila hal tersebut dibutuhkan untuk mencapai proses penyelesaian yang lebih fair ditinjau dari aspek kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawi atau disebut *according to the principle of justice*.¹⁰¹ Pendapat Yahya Harahap ini

memperkuat praktik penafsiran oleh hakim maupun tindakan Jaksa Penuntut Umum yang mana tindakan penuntut umum ini merupakan wujud dari asas diskresi. Selain pertimbangan tersebut juga terdapat suatu prinsip yakni prioritas baku dari Gustav Radbruch, di mana keadilan harus selalu

⁹⁹ Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 856

¹⁰⁰ Ahmda Rifai, **Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 38

¹⁰¹ M. Yahya Harahap, *Opcit*, Hlm. 642-643

diprioritaskan oleh hakim ketika hakim memilih antara keadilan atau kemanfaatan maka yang dipilih haruslah keadilan, begitu juga ketika yang disandingkan dalam pilihan adalah antara kemanfaatan dan kepastian hukum, yang dipilih haruslah kemanfaatan.¹⁰² Prinsip prioritas baku tersebut juga dianut dalam pasal 18 RUU KUHP yang disusun oleh panitia penyusun RUU KUHP 1991/1992.¹⁰³ Dengan menyadari hal-hal tersebut maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya hakim sebisa mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.¹⁰⁴

Maka berdasarkan hal yang diuraikan diatas penulis berkesimpulan bahwa peran Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali bukanlah atas kepentingannya sendiri. Melainkan Jaksa Penuntut Umum menjalankan amanat dari kontrak sosial seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali atas nama masyarakat secara luas beserta korban dari tindak pidana. Dari penjelasan diatas penulis mendeskripsikan bahwa alasan atau kepentingan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah bertujuan untuk memperbaiki keputusan yang keliru. Dalam tiap prosedur dalam hukum acara sampai dikeluarkannya putusan terdapat beberapa proses. Putusan yang mempidana akan sah apabila penerapannya sesuai serta memenuhi seluruh syarat dan ketentuan hukum acara pidana. Hukum acara pidana memang telah diatur

¹⁰² Marcus Priyo Gunarto, Opcit. Hlm. 471

¹⁰³ Pasal 18 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi "*keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata*"

¹⁰⁴ Marcus Priyo Gunarto. Op.cit, Hlm. 471

sedemikian kongkrit tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dalam menerapkannya sampai menjatuhkan putusan yang keliru. Dampak dari putusan yang keliru tersebut akan merugikan banyak pihak. Kerugian pada banyak pihak tersebut karena sistem peradilan pidana adalah sistem yang saling berkaitan antara pihak aparaturnya negara, terpidana/ terdakwa maupun masyarakat. Dengan diungkapkannya kebenaran sejati yang sudah terbukti belum menjamin terhindar dari putusan yang keliru. Sebab, melihat Hakim sebagai pejabat yang berhak mengeluarkan putusan adalah manusia yang tidak luput dari kekhilafan. Maka hal tersebut memberikan potensi terjadi kekeliruan dalam memberikan dasar pertimbangan hukum terhadap fakta yang sebenarnya. Fakta sebenarnya adalah suatu kebenaran materiil. Kriteria kekhilafan hakim yang terlihat dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi dasar alasan serta syarat dalam mengajukan Peninjauan Kembali. Ketentuan tersebut telah diatur dalam pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana. Menurut Adami Chazawi, apabila Hakim memberikan suatu pertimbangan hukum yang keliru, hal tersebut akan mengarah pada suatu peradilan yang sesat.¹⁰⁵

Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil negara, masyarakat serta korban juga berhak mengajukan Peninjauan Kembali dengan urgensi memperbaiki keputusan yang keliru. Tindakan tersebut termasuk memenuhi tujuan hukum acara pidana yakni menemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenar-benarnya. Hal tersebut juga dilakukan dengan dasar pertimbangan dari meninjau serta menimbang suatu putusan demi terwujudnya suatu

¹⁰⁵ Adami Chazawi, Op. Cit, Hlm.3

keadilan. Karena sesuai dengan prinsip prioritas baku, bahwa suatu keadilan harus diutamakan diatas suatu kepastian hukum. Menurut prinsip tersebut jugalah Mahkamah Agung menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Meskipun tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syarat formil pengajuan Peninjauan Kembali. Pertimbangan hakim tersebut juga berdasar pada pasal 10 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut mengatakan bahwa hakim dan persidangan tidak boleh menolak memeriksa perkara. Sekalipun dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur. Karena pasal tersebut menentukan hal tersebut, maka hakim diwajibkan untuk mengadili atau memeriksa setiap perkara yang diajukan keperadilan.

Apabila memang diharuskan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas kepentingan Terpidana, hal tersebut bisa saja terjadi. Sebagai contoh apabila ditemukan keadaan baru yang diduga dapat menghapus seluruh tuntutan pidana terpidana saat terpidana telah meringkuk di dalam lembaga permasyarakatan. Akan tetapi terpidana tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali. Sebagai aparat penegak hukum, Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan Peninjauan Kembali demi tercapainya tujuan hukum acara pidana yakni kebenaran materiil. Karena Jaksa Penuntut Umum adalah pemegang kekuasaan terbesar dalam penuntutan berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk menjalankan kekuasaannya tersebut Jaksa harus terbebas dari pengaruh pihak manapun. Maka juga

tidak menutup suatu kemungkinan Jaksa Penuntut Umum menuntut bebas dalam perkara yang sedang ditanganinya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang pada ketentuannya dapat dilakukan oleh Terpidana atau Ahli Warisnya. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 263 ayat 1 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981. Dalam pasal tersebut menyebutkan secara eksplisit “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap ... terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali”. Dalam perkembangannya terdapat kasus Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. Peninjauan Kembali oleh Penuntut Umum dimulai oleh kasus Mochtar Pakpahan. Kasus tersebut terjadi pada tahun 1996. Putusan dari Peninjauan Kembali tersebut menjadi yurisprudensi atas kasus Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum.

Tindakan Jaksa Penuntut Umum tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara aturan hukum dan keadaan praktik. Meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum positif, Jaksa Penuntut Umum memiliki urgensi untuk melakukan Peninjauan Kembali. Urgensi yang pertama adalah Jaksa Penuntut Umum memiliki hak yang sama dengan terpidana dalam hukum acara pidana. Urgensi tersebut didasari atas teori kontrak sosial. Karena kontrak sosial tersebut beberapa hak dari korban dan masyarakat diserahkan kepada negara. Hal itu berarti segala reaksi masyarakat terhadap tindak pidana dikontrol oleh negara. Karena kontrol itu negara harus mampu memfasilitasi warganya ketika kejahatan menciderai masyarakat. Kemudian

negara mengamanatkan kekuasaan dalam bidang penuntutan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2004. Dan diperkuat oleh asas *equality before the law* dan *equity of arms* sebagai kriteria dalam *fair trial*.

Urgensi yang kedua adalah memperbaiki putusan yang keliru dalam hal mencari kebenaran materiil sesuai tujuan hukum pidana. Urgensi tersebut didasarkan putusan adalah hasil pertimbangan hakim yang juga merupakan manusia. Manusia tersebut pastinya tidak luput dari kekhilafan. Dan pasal 263 ayat 2 huruf c secara eksplisit menyebutkan “apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim ...”. Kemudian dengan diungkapkannya kebenaran sejati yang sudah terbukti belum menjamin terhindar dari putusan yang keliru. Memperbaiki putusan yang keliru tersebut merupakan suatu upaya untuk mencari fakta-fakta yang sebenarnya. Fakta-fakta yang sebenarnya tersebut adalah suatu kebenaran materiil. Dan menemukan kebenaran materiil merupakan suatu tujuan dari hukum acara pidana.

B. Saran

Dalam hal ini, peneliti memberikan suatu rekomendasi terkait dengan bahasan-bahasan kesimpulan pada bab-bab sebelumnya yakni sebagai berikut:

1. Melakukan revisi pada peraturan tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, khususnya pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut dapat

dilakukan dengan pembaharuan kebijakan hukum acara pidana

terutama pada ketentuan Peninjauan Kembali.

2. Sebaiknya terhadap pihak terpidana atau ahli warisnya dan pihak Jaksa

Penuntut Umum diberikan kesempatan yang sama dalam mengajukan

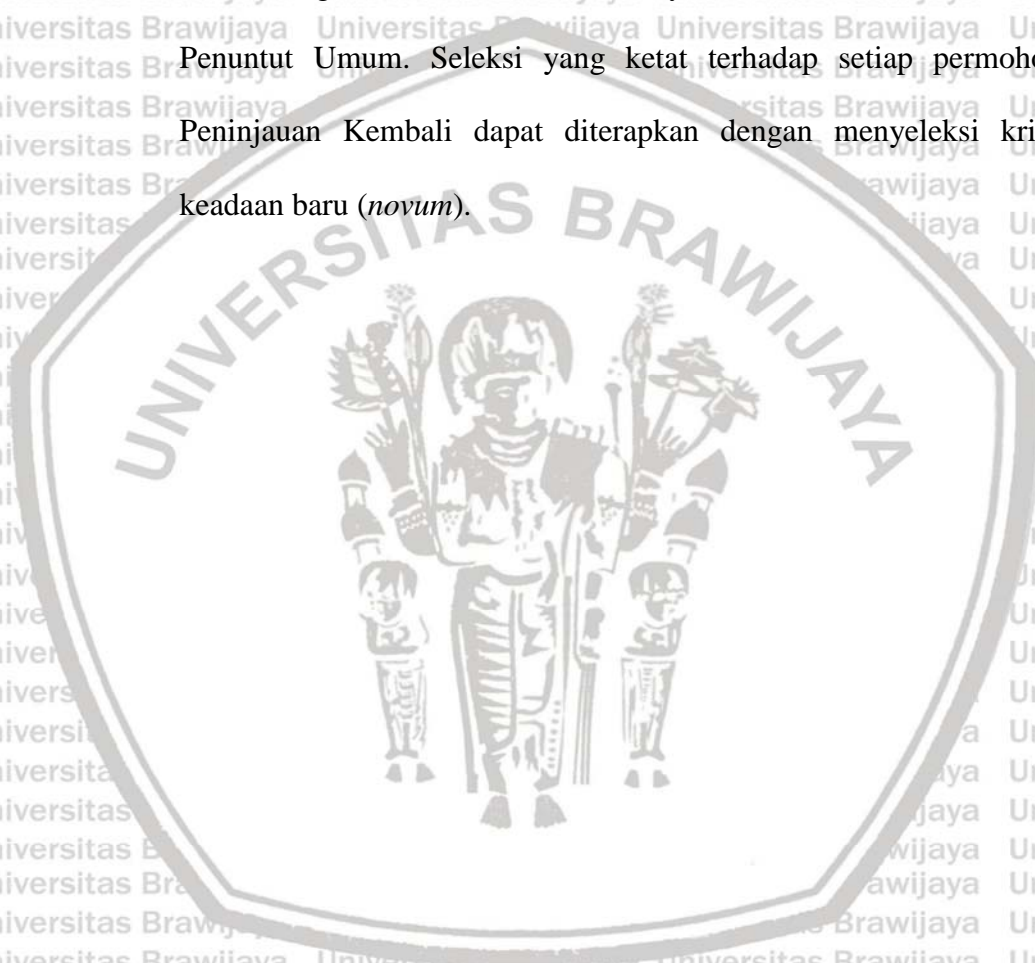
Peninjauan Kembali. Hal tersebut dengan memperhatikan asas

keseimbangan dan keterwakilan masyarakat serta korban oleh Jaksa

Penuntut Umum. Seleksi yang ketat terhadap setiap permohonan

Peninjauan Kembali dapat diterapkan dengan menyeleksi kriteria

keadaan baru (*novum*).



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Hakim Garuda Nusantara et all, **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Jakarta, Djambatan, 2002.

Adami Chazawi, **Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana (Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat)**, Sinar Grafika, Jakarta 2010

Adami Chazawi, **Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik Peradilan Sesat**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Ahmada Rifai, **Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Andi sofyan & Abd. Asis, **Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar**, Kencana, Jakarta, 2014.

Apeldon Van, **Inleiding Tot de Stude van Het Nederlands Recht**, Alih Bahasa Oetarid Sadino, Pradya Paramita, Jakarta, 1990.

Bagir Manan, **Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004**, Mahkamah Agung R.I, Jakarta, 2005.

Bambang Pramono, **Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana**, Yogyakarta, Liberty, 2008

Chazawi adami, **Kemahiran & Keterampilam dalam Praktik Hukum Pidana**, Bayu Media, Malang, 2013

Departemen Kehakiman RI, **Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Cet. Keenam, 2002

Fence M. Wantu, **Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, Hlm. 108

Hadari Djenawi Tahir, **Herziening di dalam KUHAP**, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002

Ishaq, **Dasar-dasar ilmu hukum**, Jakarta, 2012 Sinar Grafika.

J.C.T. Simorangkir, dkk, **Kamus Hukum**, Jakarta, Aksara Baru, 1983

Jhonny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011

Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan**, Mandar Maju, Bandung, 2010

Luh Gede Siska Dewi Gelgel, **Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif**, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2013.

M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

M.Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid II)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Mardjono Reksodipoetro, **Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)**, dikutip dari Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, 1994

Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, **Pengantar Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 2000.

Parman Soeparman, **Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan**, Refika Aditama, Bandung, 2009

R. Atang Ranoemihardjo, **Hukum Acara Pidana**, Bandung: Tarsito, 2006

R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta, Sinar Grafika, 2006

Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Siswo Wiratmo, **Pengantar Ilmu Hukum (PIH)**, Perpustakaan Fakultas Hukum
 UII, Yogyakarta, 1990

Siti Aminah, **Prinsip-Prinsip Hak Atas Peradilan Yang Adil Dan Tidak
 Memihak (Fair Trial)**, ILRC, Jakarta, 2011

Soedjono Dirjosisworo, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta, Raja Grafindo
 Persada, 2004.

Soeharto & Jonaedi Efendi, **Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara
 Pidana**, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2012

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty,
 Yogyakarta, 1991

Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, cet. Ketujuh, Bandung,
 Sumur, 2003

Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,
 Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta,
 2005.

Yan Pramadya Puspa, **Kamus Hukum (Edisi Lengkap)**, Aneka, Semarang, 1997

Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Jurnal

Gunarto, **Mengembalikan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Sesuai Asas
 Hukum**, Mimbar Hukum Voulme. 03, Fakultas Hukum Universitas Gajah
 Mada, Yogyakarta, 2009

HMA Kuffal, **Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum**, UMM Press,
 Malang, 2007

Luh Gede Siska Dewi Gelgel, **Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim
 Penjabaran Nilai Hukum Progresif**, Fakultas Hukum, Universitas
 Udayana, 2013.

Pande Made Ristya Yunitya, **Analisis Yuridis Novum Dalam Bentuk Error In
 Persona Korban Sebagai Dasar Permohonan Pemeriksaan Peninjauan**

Kembali Perkara Pembunuhan Dengan Terpidana Imam Chambali Alias Kemat dan Upaya Hukum Terpidana Untuk Memperoleh Rehabilitasi dan Ganti Rugi (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor 89 PK/Pid/2008)

Saut P. Panjaitan, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian dan Sistematika)**, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998

Siti Aminah, **Prinsip-Prinsip Hak Atas Peradilan Yang Adil Dan Tidak Memihak (Fair Trial)**, ILRC, Jakarta, 2011

Alfin Sulaiman, **Pergeseran Fungsi PK Sebagai Offender Oriented Ke Arah Victim Oriented**, Suara Pembaca, 29 Juli 2009

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Konvensi Sipil dan Politik (*ICCPR*)

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1969, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 341

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1982 tentang Peninjauan

Kembali, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor. 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 179

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 tahun 1983 tentang

Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Lembaran Negara Tahun

1983 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

157

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 197

Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 124

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1982 tentang Peninjauan

Kembali, Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 171, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 143

Sumber Internet

Joe, Sengkon dan Karta, **Sebuah Ironi Keadilan**, 26 April 2009,

<http://www.kompasonline.com>. Diakses pada 22 Januari 2016 pukul 15.13

WIB.

Putusan

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03

Putusan MA No. 275/ Pid/ 1983

Putusan Mahkamah Agung No. 109 PK/ Pid/ 2007

Putusan Mahkamah Agung No. 55 PK/ Pid/ 1996

LAMPIRAN

